

# STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**



# STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA 2017

<http://papua.bps.go.id>

---

# STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA

## Statistics of Papua Province

### 2017

ISBN : 2477-460X  
Nomor Katalog/Catalog Number : 1101001.94  
No Publikasi / Publications Number : 9400.1705  
Ukuran Buku/Book Size : 18,2 cm X 25,7 cm  
Jumlah Halaman/Number of Pages : 74 + vi halaman/pages

Naskah/Manuscript :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua  
BPS - Statistics of Papua Province

Penyunting/Editor :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua  
BPS - Statistics of Papua Province

Perancang Sampul/Cover Designer :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua  
BPS - Statistics of Papua Province

Diterbitkan Oleh/Published by :  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua  
BPS - Statistics of Papua Province

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.*

---

# PENULIS

## **Koordinator**

Drs. Simon Sapary, M.Sc

## **Editor**

Eko Mardiana, SE

## **Penulis dan Pengolah Data**

Lia Pujialarasari, SST

Deny Maghfiroh, SST

## **Lay Out dan Desain Cover**

Puteri Dasa Ratih, SST

<http://papua.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR



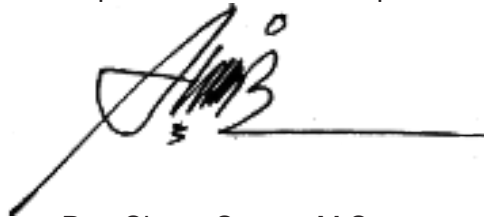
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Statistik Daerah (Statda) Provinsi Papua 2017. Statistik Daerah merupakan salah satu publikasi tahunan BPS Provinsi Papua yang bertujuan untuk memotret kondisi Provinsi Papua.

Publikasi ini menyajikan indikator terpilih yang menggambarkan kondisi Papua dalam bentuk uraian deskriptif sederhana. Sehingga diharapkan membantu dalam perencanaan, evaluasi dan memahami kondisi umum Provinsi Papua.

Semoga publikasi mampu memberikan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada pengguna data, baik dari instansi pemerintah maupun swasta serta kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terimakasih.

Jayapura, September 2017  
Kepala BPS Provinsi Papua



Drs. Simon Sapary M.Sc

# DAFTAR ISI

1. GEOGRAFIDANIKLIM	1	11. INDUSTRI	24
2. PEMERINTAHAN	3	12. KONSTRUKSI	25
3. PENDUDUK	6	13. HOTELDANPARIWISATA	27
4. KETENAGAKERJAAN	8	14. TRANSPORTASIDANKOMUNIKASI	29
5. PENDIDIKAN	11	15. PERBANKANDANINVESTASI	31
6. KESEHATAN	14	16. HARGA-HARGA	33
7. PERUMAHANDANLINGKUNGAN	16	17. PENGELUARANPENDUDUK	35
8. PEMBANGUNANMANUSIA	18	18. PERDAGANGAN	37
9. PERTANIAN	21	19. PENDAPATANREGIONAL	39
10. PERTAMBANGANENERGI	23	20. PERBANDINGANREGIONAL	41
		LAMPIRANTABEL	44

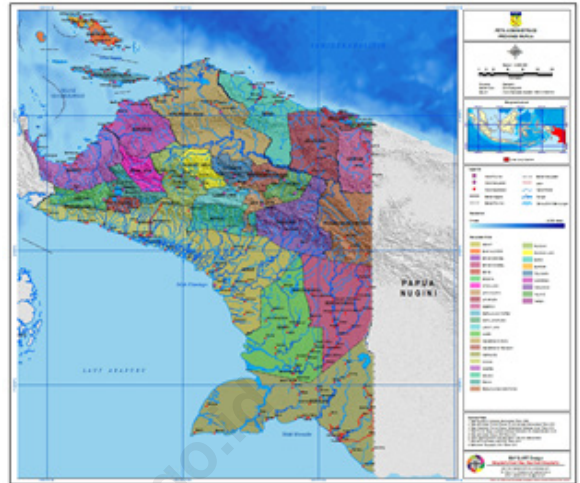
---

<http://papua.bps.go.id>

---

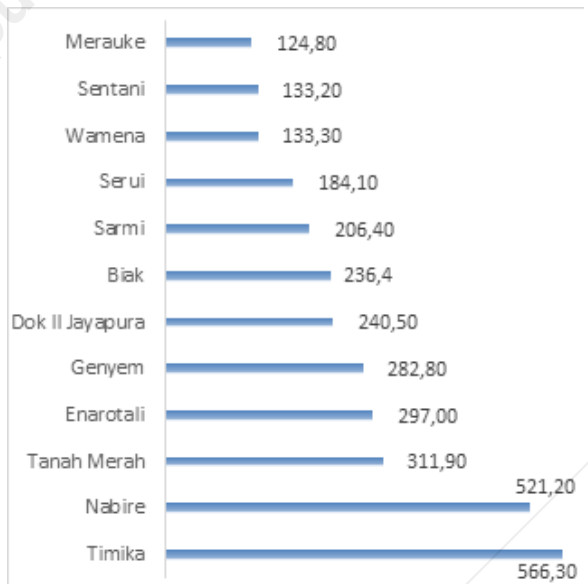
Papua merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, dengan ibukota Jayapura. Secara astronomis, Papua terletak pada 2°25' - 90° Lintang Selatan dan 130° - 141° Bujur Timur. Dari sisi geografis, Papua di sebelah utara dibatasi Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah selatan dibatasi Laut Arafuru. Di bagian barat, Papua berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea.

**Gambar 1.1** Peta Provinsi Papua



Luas wilayah Papua mencapai 316 ribu km<sup>2</sup> dan tercatat sebagai provinsi terluas di Indonesia. Hingga saat ini, Papua terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kotamadya. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluas yang mencapai hampir 15 persen dari total luas Papua, sebaliknya Kabupaten Supiori merupakan kabupaten terkecil dengan luas hanya 634 km<sup>2</sup>.

**Gambar 1.2** Rata-Rata Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Papua(mm), 2016



Wilayah Papua terletak pada ketinggian antara 0 - 3.000 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan keadaan topografi, wilayah pesisir Papua umumnya merupakan dataran rendah sedangkan wilayah tengah merupakan daerah pegunungan.

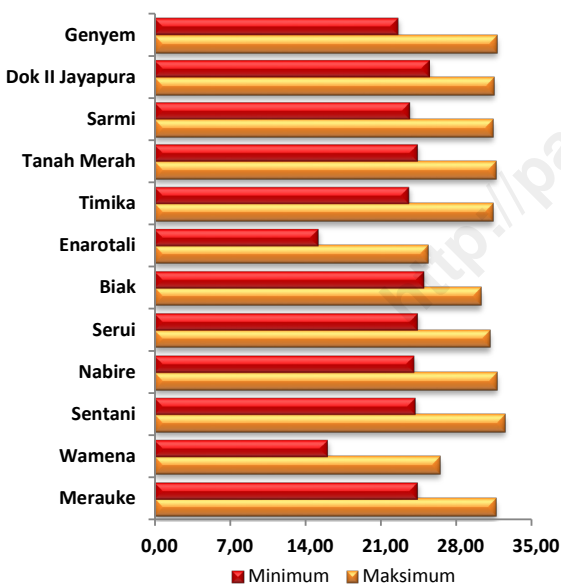
Papua merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selama tahun 2016, rata-rata curah hujan di Papua bervariasi. Curah hujan terendah tercatat 124,80 mm di Stasiun Merauke dan yang tertinggi tercatat 566,30 mm di Stasiun Mimika.



**Tabel 1.2 Statistik Geografi dan Iklim  
Provinsi Papua Tahun 2016**

Uraian	Satuan	Min.	Maks.
Curah Hujan	mm	124,80	566,30
Rata-rata kelembaban udara	%	81,80	87,8
Rata-rata tekanan udara	mb	1.009,80	1.013,30
Rata-rata penyinaran matahari	%	44,70	70,30
Kecepatan angin	knot	2,00	6,40
Rata-rata suhu udara	0C	19,00	28,10

**Gambar 1.3 Suhu Udara Rata-Rata Maksimum dan Minimum di Provinsi Papua 2016 (°C)**



Papua merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di Papua terdapat 12 stasiun pengamatan yang digunakan untuk memantau cuaca. Stasiun tersebut mengukur curah hujan, rata-rata kelembaban udara, rata-rata tekanan udara, rata-rata penyinaran matahari, kecepatan angin dan rata-rata suhu udara.

Kelembaban udara di Papua relatif tinggi. Pada tahun 2016, rata-rata kelembaban udara berkisar antara 77,30 persen yang tercatat di Stasiun Sentani, sampai dengan 87,8 persen yang tercatat di Stasiun Biak. Sementara rata-rata tekanan udara bervariasi antara 1.009,80 mb sampai 1.013,10 mb. Adapun rata-rata penyinaran matahari dalam kisaran 44,70 persen tercatat di Stasiun Tanah Merah, hingga 70,30 persen tercatat di Stasiun Merauke.

Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh penyinaran matahari, tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan sifat permukaan bumi. Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua pada tahun 2016 berkisar 19,00 0C – 28,10 0C. Suhu udara minimum tercatat 16,10 0C di Stasiun Wamena, sedangkan suhu udara maksimum tercatat 32,50 0C di Stasiun Sentani.

Luasnya wilayah Papua menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah secara terus menerus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua, turut mendorong beberapa kabupaten di Provinsi Papua mengalami pemekaran. Banyaknya program bantuan yang besar untuk wilayah desa (seperti Respek, PNPB Mandiri, dan Anggaran 1,4 M tiap desa) juga menyebabkan makin banyaknya pemekaran wilayah administratif sampai tingkat desa/kampung. Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1 kota dengan 250 kecamatan dan 2.442 kelurahan/desa. Sementara sampai tahun 2016, Provinsi Papua sudah mekar menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan 541 kecamatan dan 4.787 desa/kelurahan.

Jumlah kecamatan terbesar berada di Kabupaten Yahukimo yaitu 51 kecamatan, sebaliknya jumlah kecamatan terkecil berada di Kabupaten Supiori, Mamberamo Tengah, Yalimo, Deiyai, dan Kota Jayapura yang masing-masing hanya memiliki 5 kecamatan. Pemekaran wilayah yang terjadi diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di wilayah Papua dan mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

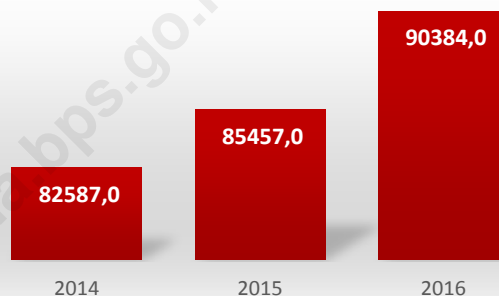
Salah satu dampak yang dihasilkan oleh pemekaran wilayah adalah peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama tiga tahun terakhir, jumlah PNS di Provinsi

**Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Papua 2014-2016**

Wilayah Administrasi	2014	2015	2016
Kabupaten	28	28	28
Kota	1	1	1
Kecamatan	470	499	541
Desa/Kelurahan	4.375	4.445	4.787

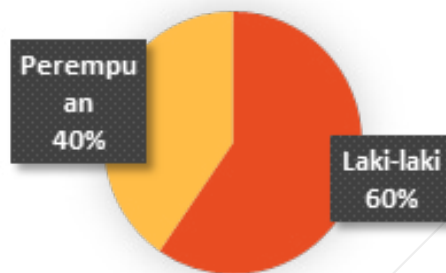
Sumber : Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 2.1 Jumlah PNS Daerah di Papua 2014-2016**



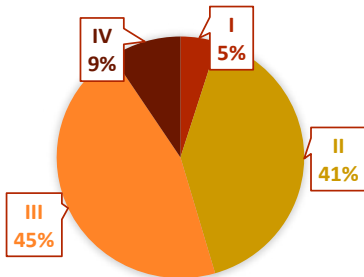
Sumber : Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 2.2 Persentase PNS di Papua Menurut Jenis Kelamin 2016**



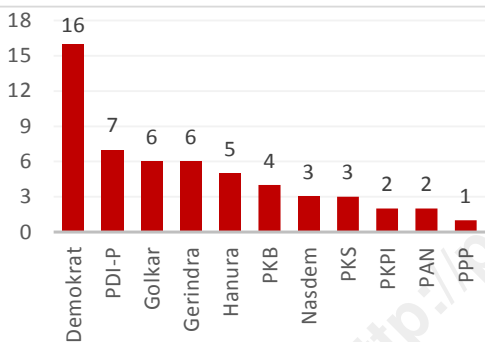
Sumber : Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 2.3** Persentase PNS di Provinsi Papua Berdasarkan Golongan 2016



Sumber : Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 2.4** Jumlah Anggota DPRD Papua Berdasarkan Fraksi 2016



Sumber : Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 2.5** Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin 2016



Sumber : Papua Dalam Angka 2017

Papua meningkat dari 82,58 ribu orang pada tahun 2014 menjadi 90,3 ribu orang pada tahun 2016.

Jika dilihat menurut gendernya, maka ternyata jumlah PNS laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah PNS Perempuan.

Selanjutnya, tingkat pendidikan berhubungan dengan golongan PNS. Pada tahun 2016, 45,47 persen PNS di Papua mempunyai golongan I dan golongan II. Sementara sisanya masing-masing sebesar 45,25 persen golongan III dan 9,27 persen golongan IV.

Anggota DPRD Papua tahun 2016 hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tahun 2014 berjumlah 55 orang, yang didominasi oleh Partai Demokrat sebanyak 16 orang, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 7 orang dan Partai Golkar dan Gerindra yang masing-masing sebanyak 6 orang. Sisanya sebanyak 20 orang berasal dari 6 partai politik.

Dari total 55 orang anggota DPRD Papua, mayoritas anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki atau mencapai 93 persen sedangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 7 persen.

Pada tahun 2015, pendapatan Provinsi Papua mencapai 11,8 triliun rupiah, dimana sebagian besar pendapatan berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 912 milyar rupiah. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, PAD Papua justru mengalami penurunan lebih dari 30 milyar rupiah.

Jumlah anggaran yang dibelanjakan selama tahun 2015 mencapai 12,39 triliun rupiah. Proporsi terbesar pembelanjaan digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 56,30 persen yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, dan belanja hibah. Sedangkan anggaran untuk belanja langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

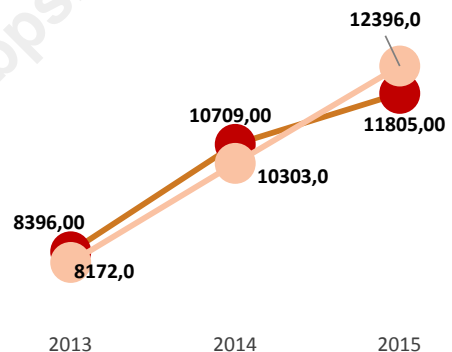
Realisasi pengeluaran APBD Provinsi Papua tahun 2015 mengalami defisit sekitar 591 milyar rupiah, setelah pada tahun sebelumnya juga mengalami surplus sebesar 406 milyar rupiah. Hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya target pendapatan asli daerah untuk menggenjot pemasukan daerah.

**Tabel 2.2 Realisasi APBD Provinsi Papua 2015 (Miliar Rupiah)**

Uraian	Realisasi
Pendapatan	11.805
1. PAD	912
2. Dana perimbangan	3.256
3. Lain-lain pendapatan yang sah	7.636
Belanja	12.396
1. Belanja Tidak Langsung	6.980
2. Belanja Langsung	5.416

Sumber : Papua Dalam Angka 2017

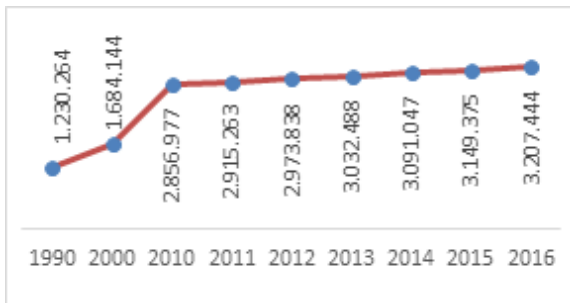
**Gambar 2.4 Jumlah Anggota DPRD Papua Berdasarkan Fraksi 2016**



Sumber : Papua Dalam Angka 2017

# 3 PENDUDUK

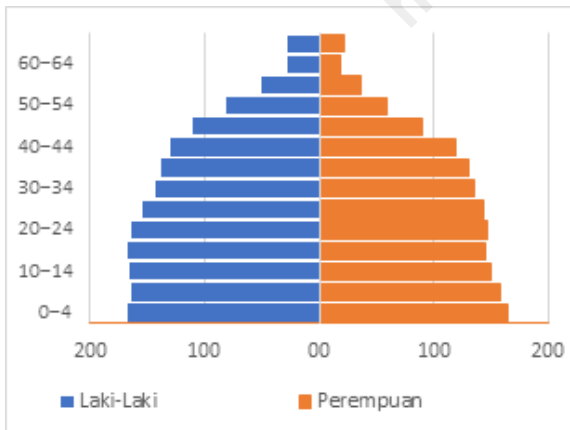
**Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Provinsi Papua 1990-2016**



**Tabel 3.1 Indikator Kependudukan Provinsi Papua Tahun 2016**

Uraian	Jumlah
Jumlah penduduk	3 207 444
Laki-laki	1 689 971
Perempuan	1 517 473
Rasio Ketergantungan	48,09
Rasio Ketergantungan Muda	44,3
Rasio Ketergantungan Tua	2,26
Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	10,13

**Gambar 3.2 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2016 (000 orang)**



Jumlah penduduk Papua tahun 2016 menurut hasil proyeksi SP2010 sebanyak 3,20 juta jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Supiori (18,48 ribu jiwa). Sementara jumlah penduduk terbanyak adalah di Kota Jayapura (288,78 ribu jiwa). Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,68 juta dan penduduk perempuan sebanyak 1,51 juta. Dengan demikian, rasio jenis kelamin tahun 2016 sebesar 111,37. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111-112 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Papua tahun 2016 sebanyak 2,18 juta jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif sebanyak 1,01 juta jiwa sehingga angka beban ketergantungan tahun 2015 sebesar 48. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Papua mempunyai tanggungan 48 penduduk usia nonproduktif. Piramida penduduk Papua tahun 2016 memperlihatkan sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida pada usia muda (0-9 tahun) sedikit lebih lebar dari kelompok umur 10-19 tahun mengindikasikan dampak kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) di Papua baru terlihat pada sepuluh tahun terakhir. Ujung piramida menunjukkan angka harapan hidup penduduk Papua masih rendah.

Laju pertumbuhan penduduk Papua tahun 2015-2016 adalah sebesar 0,12 persen. Pada lima tahun terakhir, laju pertumbuhan

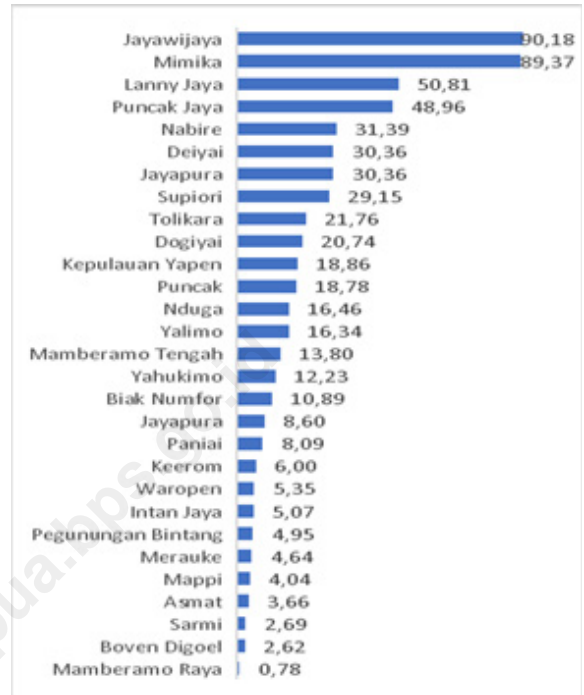


penduduk di Papua menunjukkan tren menurun. Sebelum tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Papua masih berada di kriteria pertumbuhan penduduk tinggi (di atas 2 persen). Namun mulai tahun 2013, angka pertumbuhan penduduk sudah berada di bawah 2 persen yang berarti saat ini laju pertumbuhan penduduk Papua berada di kriteria sedang.

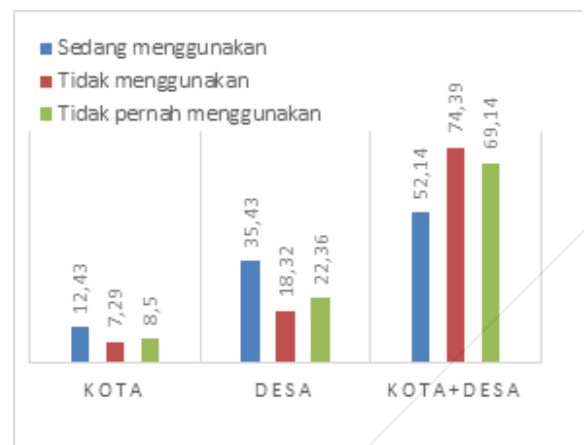
Dengan wilayah seluas 316.553,07 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Papua hanya 9,95 yang berarti bahwa tiap satu km<sup>2</sup> didiami oleh 10 penduduk. Wilayah dengan kepadatan penduduk paling jarang adalah Mamberamo Raya dimana tiap satu km<sup>2</sup> hanya dihuni satu penduduk; sedangkan di Kota Jayapura, jumlah penduduk di tiap km<sup>2</sup> mencapai 303 jiwa.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Papua masih sangat rendah. Sebesar 69,14 persen perempuan usia subur (15-49 tahun) di Papua tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Hanya 22,36 persen yang masih menggunakan alat kontrasepsi, sementara 8,5 persen sudah tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Menurut tempat tinggalnya, persentase perempuan usia subur yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi jauh lebih banyak berada di wilayah perdesaan yang persentasenya mencapai 74,39 persen dari total perempuan usia subur di perdesaan; sementara di perkotaan, persentasenya kurang dari 50 persen.

**Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016**



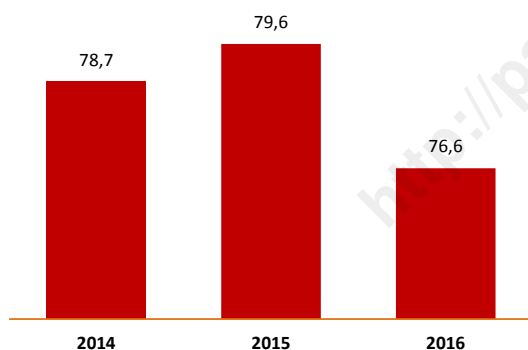
**Gambar 3.4 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penggunaan KB, Provinsi Papua Tahun 2016**



**Tabel 4.1 Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2014 – 2016 (Keadaan Agustus)**

Komponen	2014	2015	2016
1. Angkatan Kerja Bekerja	1.675.113	1.741.945	1.722.162
Penganggur	1.617.437	1.672.480	1.664.485
2. Bukan Angkatan Kerja	57.676	69.465	57.677
Sekolah	454.291	447.285	523.300
Mengurus Rumah Tangga	192.348	174.949	195.635
Lainnya	204.659	230.290	268.585
	57.284	42.046	59.080

**Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2014-2016**



International Labor Organization (ILO) memiliki The Labor Force Concept yang membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan menganggur. Sementara yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk usia kerja di Papua mencapai 2.245.462 orang, yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.722.162 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 523.300 orang. Dibandingkan periode Agustus tahun sebelumnya, jumlah angkatan kerja mengalami sedikit penurunan, sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja justru mengalami kenaikan 16,9 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Besaran TPAK memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi. Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 76,6 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK Papua menunjukkan penurunan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh bergesernya penduduk usia kerja menjadi mengurus

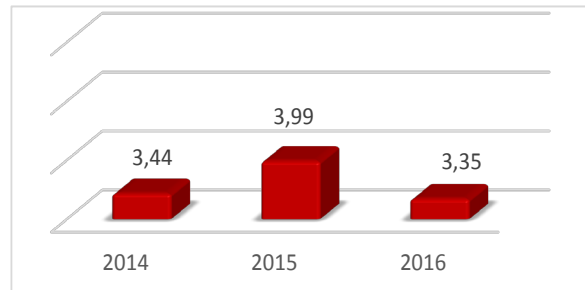
rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja. Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha. Pada tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,44 persen kemudian meningkat setahun kemudian. Pada tahun 2016, TPT Provinsi Papua sebesar 3,35 persen. Artinya, 96,65 persen angkatan kerja dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan.

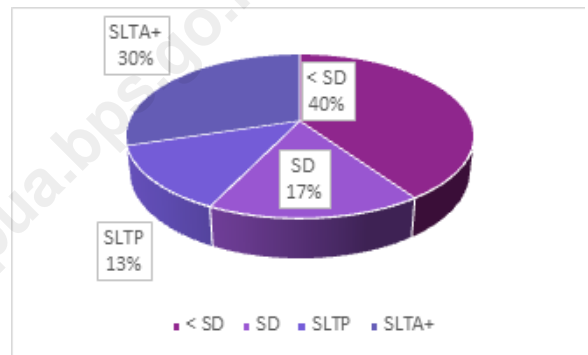
Dari jumlah penduduk bekerja di Papua, sebanyak 40,37 persen memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas sebesar 23,55 persen. Sisanya sebesar 29,89 persen, merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP, masing-masing sebesar 16,77 persen dan 13,12 persen.

Dilihat menurut lapangan pekerjaan utama, sebanyak 65,83 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2016 adalah sektor jasa-jasa (13,40 persen) dan sektor perdagangan (9,62 persen). Sektor pertanian masih menjadi sektor tumpuan penduduk Papua meskipun secara persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

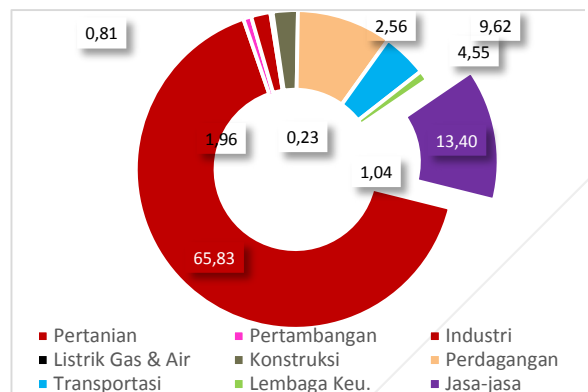
**Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014 – 2016 (Agustus)**



**Gambar 4.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016**



**Gambar 4.4 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016**



**Gambar 4.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2016**



**Tabel 4.2 Pengangguran Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016**

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mencari pekerjaan	26000	19246	42065
Mempersiapkan usaha	790	365	1155
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	7321	3183	10504
Sudah punya tapi belum mulai bekerja	3302	651	3953
Jumlah	37413	20264	57677

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Pada tahun 2016, status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 31,99 persen dan 31,10 persen. Status pekerja keluarga atau tidak dibayar didominasi oleh pekerja perempuan, mencapai 79,15 persen. Sedangkan untuk status pekerjaan sebagai buruh/karyawan, pekerja laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan.

Seseorang dikatakan menganggur jika sedang mencari kerja dan atau sedang mempersiapkan usaha dan atau putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta sudah diterima tapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2016, jumlah yang mencari pekerjaan mencapai 42.065 orang atau 72,93 persen dari total penganggur. Sementara yang mempersiapkan usaha hanya sebesar 2,0 persen dari total penganggur di Papua.

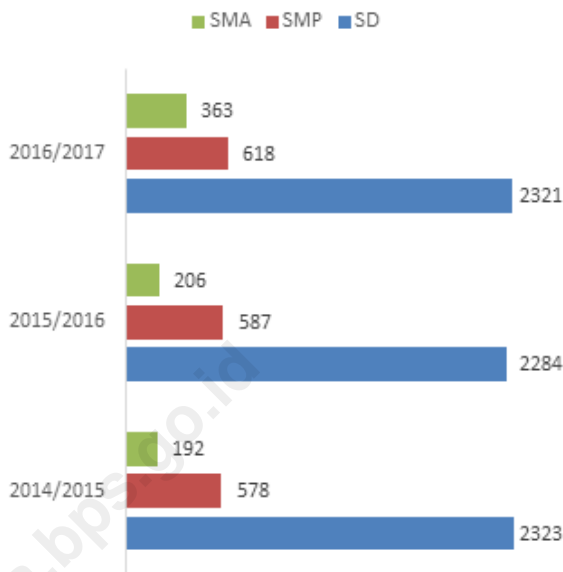
Pengangguran dengan tingkat pendidikan minimal SLTA di Papua mencapai 54,29 persen pada tahun 2015. Sementara penganggur dengan tingkat pendidikan Diploma atau Universitas sebanyak 15,83 persen. Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang dimiliki dan cenderung memilih mencari pekerjaan di sektor formal.



Keberadaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada tahun 2016, jumlah Sekolah Dasar (SD) di Papua adalah sebanyak 2.321 sekolah jumlah SLTP sebanyak 618 sekolah, dan jumlah SLTA sebanyak 363 sekolah.

Terselenggaranya kegiatan belajar-mengajar yang baik disebabkan oleh adanya tenaga pengajar dan murid. Salah satu Indikator untuk mengukur beban guru adalah melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Standar ideal rasio murid-guru adalah 1:40 (40 siswa untuk setiap guru) untuk SD; 1:21 untuk SMP; dan 1:21 untuk SMA. Pada Tahun Ajaran 2016/17, rasio murid-guru pada jenjang SD di Papua sebesar 24,86 artinya satu orang guru SD mendidik 24-25 murid SD; rasio murid-guru pada jenjang SMP di Papua sebesar 15,69 artinya satu orang guru SMP mendidik 15-16 murid SMP; dan rasio murid-guru pada jenjang SMA di Papua sebesar 12,62 artinya satu orang guru SMA mendidik 12-13 murid SMA. Jika dibandingkan dengan kondisi ideal di atas maka rasio murid-guru pada tingkat SD hingga SMA di Papua telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada jenjang Pendidikan dasar maupun menengah.

**Gambar 5.1 Jumlah Sekolah SD, SMP, dan SMA Provinsi Papua Tahun 2014-2016**



**Tabel 5.1 Jumlah Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2016**

Indikator	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK
Jumlah Murid	454 726	127 526	93 458
Jumlah Guru	18 294	8 128	7 407
Rasio Murid-Guru	24,86	15,69	12,62

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2016



**Tabel 5.2 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi Papua Tahun 2016**

Jenis Kelamin	Daerah Tempat Tinggal		Kota+Desa
	Kota	Desa	
Laki-laki	98,56	67,98	76,72
Perempuan	96,24	53,07	64,60
Laki-laki + Perempuan	97,51	60,87	71,02

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Papua, 2016

**Tabel 5.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi Papua Tahun 2016**

Jenis Kelamin	Daerah Tempat Tinggal		Kota + Desa
	Kota	Desa	
Laki-laki	10,58	5,67	7,08
Perempuan	10,11	4,14	5,73
Laki-laki + Perempuan	10,36	4,94	6,45

Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Papua tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 menjadi 71,02 persen. Artinya dari 100 penduduk umur 15 tahun ke atas terdapat 71-72 orang yang bisa membaca dan menulis.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan yang signifikan antara angka melek huruf (AMH) di perkotaan dan di perdesaan. AMH di perkotaan mencapai 97,51 persen; sedangkan di perdesaan, persentasenya hanya 60,87 persen. Demikian juga menurut jenis kelamin, dimana AMH Laki-laki lebih tinggi (76,72 persen) dibandingkan AMH perempuan (64,60 persen). Artinya, penduduk perempuan ternyata masih lebih banyak yang buta huruf dibandingkan laki-laki dan kesenjangan gender terkait AMH di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di Papua tahun 2016 adalah 6,45 tahun. Capaian tersebut masih jauh di bawah target rata-rata lama sekolah dalam Renstra 2014 yang mencapai 8,25 persen. Tabel juga menunjukkan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan. RLS di perkotaan mencapai 10,36 tahun, sedangkan di perdesaan hanya 4,94 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan penduduk umur 15 tahun ke atas telah menamatkan Pendidikan menengah pertama sedangkan di Pedesaan belum menamatkan Pendidikan dasar. Menurut jenis kelamin, RLS perempuan (5,73 tahun) sedikit di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki (7,08 tahun).

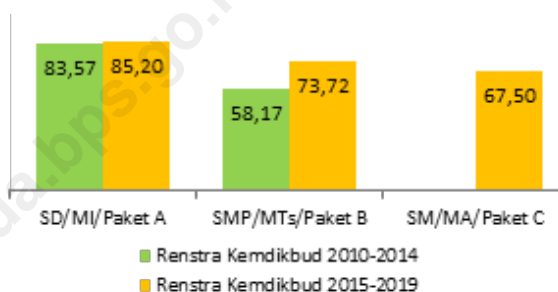
Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk bervariasi antar jenjang Pendidikan. Semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah capaian indikator tersebut. APS paling tinggi ada pada kelompok umur 7-12 tahun yang mencapai 81,11 persen. Angkanya semakin menurun hingga hanya 23,75 persen pada kelompok umur 19-24 tahun. Ini berarti meskipun lebih dari 80 persen penduduk umur 7-12 tahun sudah bersekolah, namun tidak semuanya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak faktor penyebabnya seperti tidak tersedianya fasilitas Pendidikan di wilayah terdekat atau faktor ekonomi. APS di perkotaan lebih tinggi dari APS perdesaan. Perbedaan APS perkotaan dan perdesaan terbesar terdapat pada kelompok umur 16-18 tahun yang merupakan umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat SMA/ sederajat.

Angka partisipasi murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan di Papua masih belum mencapai angka 100 persen. Ini berarti penduduk dengan umur yang sesuai dengan suatu jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Bila dibandingkan dengan Renstra 2015-2019, capaian APM tahun 2016 belum mencapai target. Terjadi ketimpangan APM yang cukup besar antara perkotaan dan perdesaan, dimana APM perkotaan pada tiap jenjang pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan APM perdesaan. Semakin tinggi jenjang Pendidikan maka semakin besar selisih capaian APM antar daerah perkotaan dan pedesaan.

**Tabel 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Papua Tahun 2016**

Kelompok Umur	Daerah Tempat Tinggal		Kota+Desa
	Kota	Desa	
7 - 12 Tahun	98,21	76,38	81,11
13 - 15 Tahun	97,93	73,15	78,86
16 - 18 Tahun	85,44	53,95	62,07
19 - 24 Tahun	39,33	15,47	23,75

**Gambar 5.3 Sasaran APM dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019 (dalam persen)**



**Tabel 5.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Papua Tahun 2016**

Jenjang Pendidikan	Daerah Tempat Tinggal		Kota+Desa
	Kota	Desa	
SD/MI/Paket A	92,70	74,77	78,66
SMP/MTs/ Paket B	78,74	46,94	54,26
SM/MA/ Paket C	71,78	33,35	43,27
Perguruan Tinggi	20,05	4,70	10,03

**Tabel 6.1 Angka Kematian Kasar dan Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2016**

Indikator	2010	2016
Angka Kematian Kasar	5,3	5,2*
AHH Laki-laki	62,5	63,4
AHH Perempuan	66,2	66,9
AHH L + P	64,3	65,1

Sumber: Statkesra dan BPS Provinsi Papua

\*) Data Tahun 2015

**Tabel 6.2 Angka Kematian Bayi Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2012**

Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Papua	56	36	47
Indonesia	30	22	26

Sumber: SDKI Tahun 2012

**Tabel 6.3 Persentase Perempuan 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Persalinan Terakhir Provinsi Papua Tahun 2016**

Indikator	Persen
Dokter kandungan	17,46
Dokter umum	2,17
Bidan	37,91
Perawat	3,95
Tenaga kesehatan lainnya	2,44
Dukun beranak/ paraji	12,78
Lainnya	19,24
Tidak ada	4,05

Sumber: Susenas 2016

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka harapan hidup (AHH) saat lahir. AHH tahun 2016 adalah 65,1 tahun, yang artinya tiap bayi yang lahir secara rata-rata diharapkan dapat hidup hingga usia 65,1 tahun. AHH penduduk Papua tahun 2016 meningkat dibandingkan AHH enam tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 64,3 tahun. Jika dilihat menurut gender, AHH perempuan lebih tinggi dari AHH laki-laki.

Derajat kesehatan juga dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Angka kematian kasar Papua tahun 2015 sebesar 5,2, artinya di tahun 2015 terdapat lima kasus kematian untuk tiap 1000 penduduk. Faktor-faktor penghambat kematian antara lain adanya fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Indikator derajat kesehatan penduduk lainnya adalah angka kematian bayi (AKB). AKB di Papua tahun 2012 masih cukup tinggi, yakni 47 kematian per 1000 kelahiran. Menurut gender, AKB laki-laki lebih tinggi dari AKB perempuan. Sejumlah penelitian yang mencoba mencari alasan lebih tingginya AKB laki-laki dibandingkan AKB perempuan sepakat bahwa kemungkinan lahir prematur lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki. Kelahiran sebelum waktunya tersebut menyebabkan bayi laki-laki memiliki kemungkinan risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan.

Menurut World Health Organization (WHO), kunci strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan adalah adanya tenaga kesehatan terlatih yang membantu dalam proses persalinan. Persentase persalinan di Papua yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 63,93 persen. Angka ini masih lebih rendah dari target nasional (90 persen). Bidan merupakan penolong proses persalinan anak lahir hidup terakhir paling utama di Papua, dimana persentasenya mencapai 37,91 persen.

Banyaknya penduduk yang menderita sakit (morbiditas) juga dapat menentukan derajat kesehatan penduduk. Persentase penduduk Papua yang menderita sakit tahun 2016 mencapai 8,28 persen dimana angka morbiditas laki-laki (8,45 persen) lebih tinggi dari morbiditas perempuan (8,08 persen). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan penduduk di Provinsi Papua mengalami peningkatan.

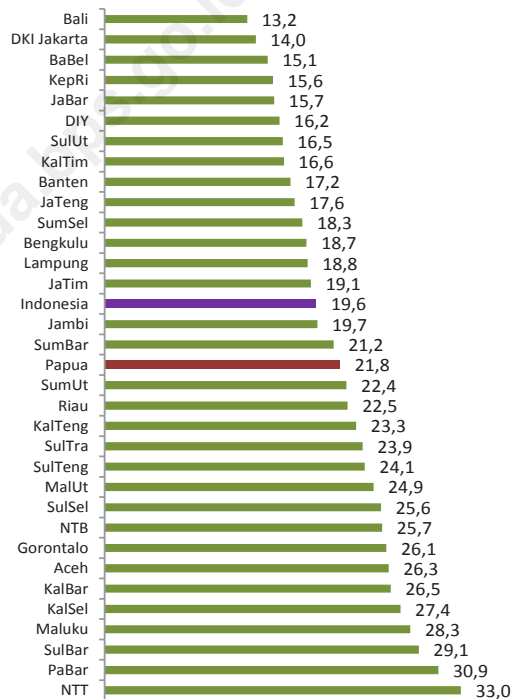
Status gizi balita juga penting diperhatikan. Estimasi jumlah balita di Papua tahun 2013 sebanyak 366.119 jiwa dimana 21,8 persen diantaranya mengalami gizi buruk dan kurang. Diantara 33 provinsi di Indonesia, 19 provinsi memiliki persentase gizi buruk-kurang di atas persentase nasional yang berkisar antara 19,7 persen hingga 33,0 persen. Persentase gizi buruk-kurang balita di Papua menempati posisi ke-17.

**Tabel 6.4 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dan Rata-rata Lama Sakit Provinsi Papua Tahun 2016**

Indikator	Persen
Laki-laki	8,45
Perempuan	8,08
Laki-laki + Perempuan	8,28
Rata-rata Lama Sakit (Hari)	5,78

Sumber: Susenas 2016

**Gambar 6.1 Persentase Gizi Buruk-Kurang Balita Menurut Provinsi Tahun 2013**

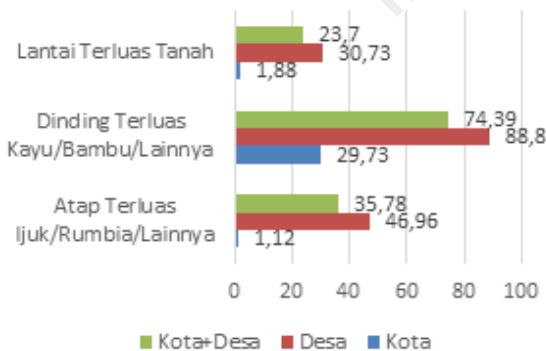




**Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan Provinsi Papua Tahun 2014-2016**

Komponen	2014	2015	2016
<b>Luas Lantai per Kapita (%)</b>			
< 10 m2	63,37	56,01	55,91
>= 10 m2	36,63	43,99	44,09
<b>Jenis Lantai Terluas (%)</b>			
Bukan tanah	77,95	74,30	76,30
Tanah	22,05	25,70	23,70
<b>Jenis Dinding Terluas (%)</b>			
Tembok	23,82	25,53	25,61
Kayu	73,54	71,70	72,42
Bambu	0,13	0,47	0,40
Lainnya	2,50	2,30	1,57
<b>Jenis Atap Terluas (%)</b>			
Beton/genteng	1,36	0,90	0,91
Sirap/seng/asbes	60,19	65,82	62,9
Ijuk/rumbia/lainnya	38,45	33,28	36,19

**Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga dengan Atap, Dinding, dan Lantai Terluas Kurang Layak, Papua Tahun 2016**



Rumah sehat dan nyaman adalah rumah yang memiliki kriteria luas lantai per kapita minimal 10 m<sup>2</sup>. Secara rata-rata, luas lantai per kapita di Papua sudah lebih dari 10 m<sup>2</sup>, namun persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> di tahun 2016 masih cukup tinggi, yaitu mencapai 55,91 persen.

Menurut jenis lantai, rumah tangga dikategorikan ke dalam rumah layak huni apabila rumah berlantai bukan tanah (marmer/granit, keramik, parket/vinil, kayu/papan, dan semen/bata merah). Sebesar 76,30 persen rumah tangga di Papua memiliki jenis lantai terluas bukan tanah, sisanya sebesar 23,70 persen masih tinggal di rumah berlantai tanah atau lainnya.

Di Papua, sebagian besar dinding rumah terluas adalah menggunakan kayu yang mencapai 72,42 persen dan 25,61 persen rumah tangga menggunakan tembok sebagai dinding rumah terluas. Sementara dilihat dari jenis atap terluas, maka rumah tangga yang beratap jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia masih banyak dijumpai, yakni mencapai sebesar 36,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Papua banyak yang tinggal di rumah kurang layak huni, terutama di wilayah perdesaan.

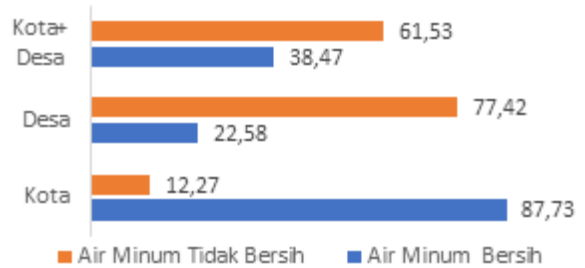


Air memegang peran penting dalam menyokong kehidupan masyarakat terutama ketersediaan sumber air minum bersih. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga di Papua yang mengkonsumsi air minum bersih hanya 38,47 persen. Menurut daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan yang cukup tajam pada persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih antara di perkotaan yang angkanya mencapai 87,73 persen dan di perdesaan yang hanya 22,58 persen.

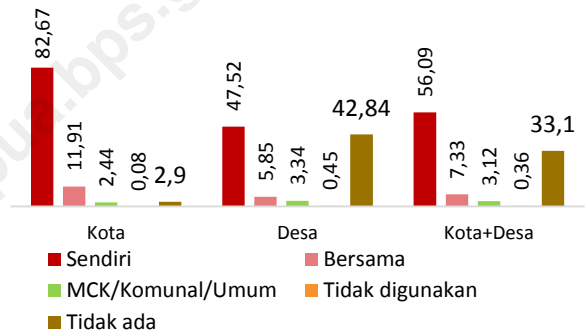
Selain ketersediaan air minum, fasilitas buang air besar (jamban) yang memadai juga merupakan prasarana yang wajib dimiliki oleh suatu rumah tangga. Di tahun 2016, hanya 56,09 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri. Rumah tangga cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Di perkotaan, persentasenya sudah mencapai 82,67 persen; sedangkan di perdesaan hanya 47,52 persen. Sementara itu, di pedesaan terdapat 33,1 persen rumah tangga tidak memiliki jamban.

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting. Dengan adanya penerangan, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN). Sebesar 39,79 persen sumber penerangan utama rumah tangga di Papua berasal dari listrik PLN; sebesar 11,11 persen berasal dari listrik bukan PLN; dan 49,1 persen sisanya berasal dari bukan listrik (petromak, lilin, dsb).

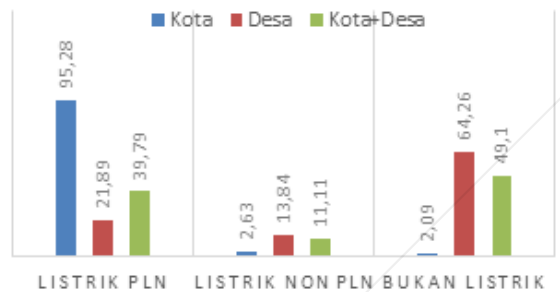
**Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Provinsi Papua Tahun 2016**



**Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar (Jamban) Provinsi Papua Tahun 2016**



**Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Provinsi Papua Tahun 2016**

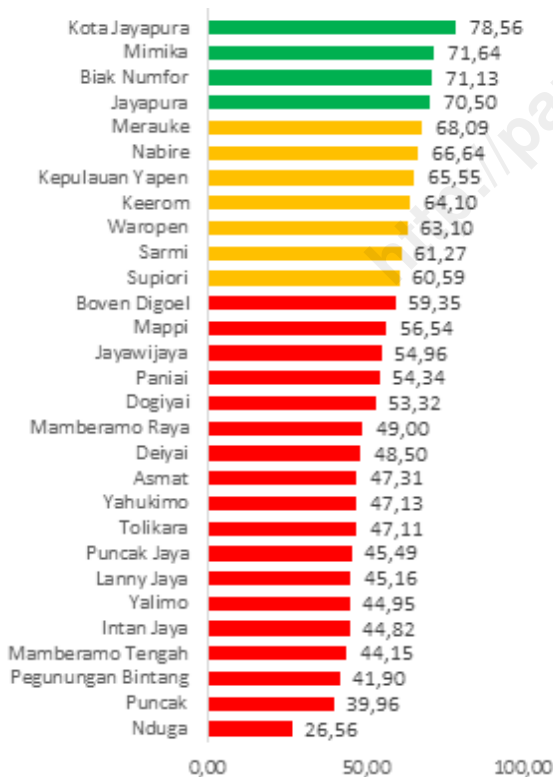


**Tabel 8.1 IPM Menurut Komponen Provinsi Papua Tahun 2014-2016**

Komponen	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	64,84	65,09	65,12
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	9,94	9,95	10,23
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,76	5,99	6,15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	6.416	6.469	6.637
IPM	56,75	57,25	58,05
Pertumbuhan IPM	0,89	0,88	1,40

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 8.1 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016**



Pada tahun 2016, pembangunan manusia di Provinsi Papua masih berstatus "rendah" yang ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah 60. Meskipun demikian, pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan yang tercermin dari terus meningkatnya IPM Papua.

IPM Papua tahun 2016 adalah sebesar 58,05. Angka ini tumbuh 1,40 persen dibandingkan tahun 2015 dan menjadi pertumbuhan IPM paling tinggi se-Indonesia.

Komponen pembentuk IPM Papua tahun 2016 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 65,12 tahun (naik 0,05 persen). Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 10,23 tahun (naik 2,81 persen). Adapun penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,15 tahun (naik 2,67 persen). Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) sebesar Rp 6,64 juta per tahun (naik 2,60 persen).

Dari 29 kabupaten/kota, sebanyak 18 kabupaten berstatus IPM rendah (<60). Ada 7 kabupaten berstatus sedang (60-70), yaitu Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, dan Supiori. Dan hanya 4 kabupaten/kota dengan status IPM tinggi (70-80) yaitu Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota.

Pada tahun 2016, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Top movers IPM di Papua (kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM paling cepat), yaitu Kabupaten Nduga (4,28 persen), Pegunungan Bintang (2,42 persen), dan Lanny Jaya (2,22 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Peningkatan ini salah satunya karena adanya sejumlah program guru bantu yang diadakan oleh pemerintah seperti SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), Indonesia Mengajar, dan lain-lain. Program ini cukup bermanfaat bagi masyarakat karena sejumlah besar sarjana terjun langsung untuk membantu proses kegiatan pendidikan.

**Gambar 8.2** **Peta Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016**



**Tabel 8.2** **Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2014-2016 (Keadaan Maret)**

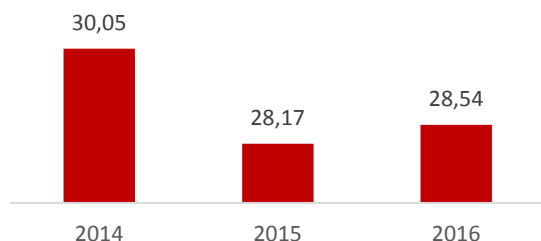
Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pengeluaran		
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Atas
2014	0,41	16,47	35,60	47,92
2015	0,39	15,41	36,36	48,24
2016	0,39	14,36	42,38	43,26

Sumber: Papua Dalam Angka 2017

Pada tahun 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Papua yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,39. Angka ini menurun 0,01 poin dibandingkan dengan Gini Ratio tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah terhadap distribusi pengeluaran penduduk.

Selain Gini Rasio, Kriteria Bank Dunia juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Tahun 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah di Papua adalah sebesar 14,36 persen yang berarti yang mengindikasikan tingkat ketimpangan sedang.

**Gambar 8.3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2014-2016**



Sumber: BPS Provinsi Papua (Maret, 2016)

**Tabel 8.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua Tahun 2014-2016**

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2014	4,47	38,92	30,05
2015	4,61	36,66	28,17
2016	4,42	37,14	28,54

Sumber: BPS Provinsi Papua (Maret, 2016)

**Tabel 8.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2016**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan			Indeks Keparahan Kemiskinan		
	K	D	K+D	K	D	K+D
2014	0,72	8,96	6,84	0,17	3,04	2,30
2015	0,79	11,72	8,82	0,21	5,07	3,78
2016	0,88	12,39	9,37	0,22	5,60	4,19

Sumber: BPS Provinsi Papua (Maret, 2016)

Persentase penduduk miskin di Papua tahun 2016 adalah sebesar 28,54 persen atau naik 0,37 persen dibandingkan persentasenya di tahun 2015. Tingkat kemiskinan di Papua tahun 2016 menjadi yang tertinggi di tingkat nasional setelah Papua Barat (25,10 persen) dan Nusa Tenggara Timur (21,85 persen). Faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Papua kemungkinan karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Menurut daerah tempat tinggalnya, persentase penduduk miskin di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Di tahun 2015, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 37,14 persen; sedangkan di perkotaan sebesar 4,42 persen. Persentase penduduk miskin menurut kota dan desa tahun 2016 juga meningkat dibanding tahun 2015.

Di tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti selama setahun terakhir rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari standar kebutuhan minimum kehidupan layak yang sudah ditentukan; dan juga semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.



Total luas panen padi Papua tahun 2016 sebesar 50.457,3 Ha. Angka tersebut meningkat sebesar 9.103,3 Ha (22 persen) dibanding tahun 2015. Peningkatan terjadi pada luas panen padi sawah yang mencapai 26 persen dari tahun 2015.

Sementara luas panen padi ladang justru turun 4,34 persen dari tahun 2015. Berbeda dengan padi, luas panen seluruh tanaman palawija di Papua menurun pada tahun 2016. Penurunan tertinggi terjadi pada tanaman kacang hijau sebesar 42,31 persen. Penurunan cukup dalam selanjutnya juga terjadi pada tanaman ubi kayu sebesar 35,73 persen. Tanaman kedelai turun 33,11 persen, tanaman kacang hijau turun 31,33 persen. Penurunan paling rendah terjadi pada tanaman ubi jalar sebesar 18,84 persen.

Ternak ayam ras pedaging sebesar 6,456 juta ekor pada tahun 2016. Populasi ternak besar babi sebanyak 560 ribu ekor dan ternak sapi potong sebanyak 111 ribur ekor. Populasi ternak paling kecil di Papua selama tahun 2016 adalah sapi perah yang hanya ada 16 ekor.

Produksi daging di Papua selama tahun 2016 paling banyak adalah produksi daging babi yaitu sebanyak 16,929 juta kg. Produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 5,855 juta kg dan produksi daging sapi potong ada sebanyak 3,595 kg. Produksi paling sedikit adalah produksi daging kuda yang hanya sebanyak 11,055 ribu kg.

**Tabel 9.1 Luas Panen Padi dan Palawija di Papua Tahun 2015 dan 2016 (Ha)**

Komoditi	2015	2016
Padi Sawah	38.977,00	49.206,60
Padi Ladang	2.377,00	1.251,70
Jagung	2.736,00	2.273,70
Ubi Kayu	3.822,00	2.456,10
Kacang Tanah	2.268,00	1.557,40
Kedelai	2.761,00	1.846,70
Kacang Hijau	429,00	247,50
Ubi Jalar	36.091,00	29.292,70

Sumber: Papua Dalam Angka 2016 dan 2017

**Tabel 9.2 Populasi dan Produksi Daging Menurut Jenis Ternak Provinsi Papua, 2016**

Nama Ternak	Populasi (ekor)	Produksi (kg)
Kuda	1.975	11.055
Sapi Perah	16	-
Sapi Potong	111.273	3.595.916
Kerbau	768	75.909
Kambing	54.060	234.148
Domba	18	-
Babi	760.472	16.929.102
Itik	68.725	43.091
Ayam Ras Petelur	560.464	410.595
Ayam Ras Pedaging	6.456.766	5.855.962
Ayam Kampung	2.017.749	2.175.135

Sumber: Papua Dalam Angka 2017

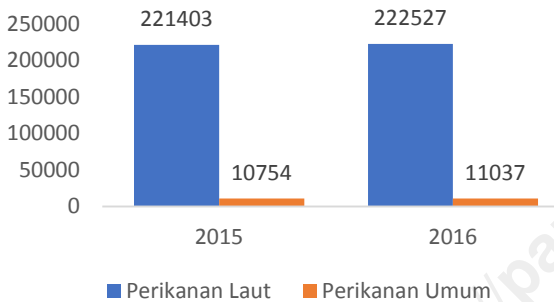


**Gambar 9.1 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor Perikanan di Papua Tahun 2016 (Ton)**

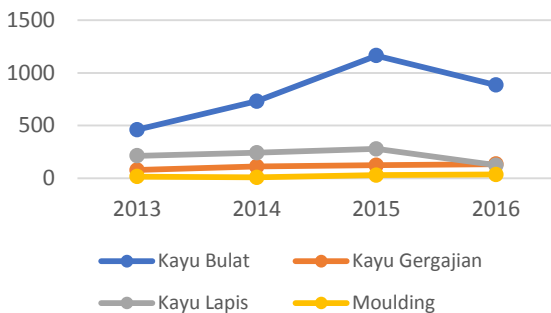
Perikanan Tangkap	Produksi	2016
Budidaya Laut	113,30	49.206,60
Tambak	1.546,20	1.251,70
Kolam Fresh	4.212,80	2.273,70
Jaring Apung	1.530,90	2.456,10

Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 9.2 Produksi Perikanan Menurut Subsektor Perikanan di Papua Tahun 2016 (Ton)**



**Gambar 9.3 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Papua (ribu m<sup>3</sup>), 2013-2016**



Produksi perikanan di Papua tahun 2016 lebih besar berasal dari perikanan laut daripada perikanan umum. Produksi perikanan laut ada sebesar 222.527 ton, meningkat 0,51 persen dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 221.403 ton. Sedangkan, produksi perikanan umum tahun 2016 sebesar 11.037 ton, meningkat 2,63 persen dibanding tahun 2015.

Produksi perikanan tangkap paling besar berasal dari Kolam Fresh sebesar 4,212 ton. Dan yang paling kecil berasal dari budidaya laut sebesar 113,30 ton.

Dari 5 perusahaan HPH, produksi kayu paling besar berasal dari jenis kayu bulat dan kayu lapis sementara paling sedikit dari jenis kayu gergajian dan moulding. Namun, selama tahun 2016, produksi kayu bulat dan kayu lapis justru menurun dibanding tahun 2015, sementara produksi kayu gergajian dan moulding meningkat dibanding tahun 2015.

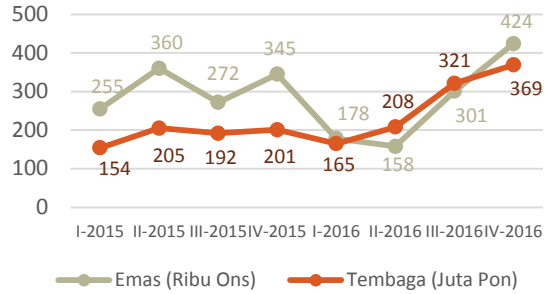
Tahun 2016, produksi kayu bulat mencapai 884.837,49 m<sup>3</sup>, nilai ini turun 23,96 persen dibanding tahun 2015. Produksi kayu lapis sebesar 124.145,27 m<sup>3</sup>, turun 55,59 persen dibanding tahun 2015. Sementara produksi kayu gergajian sebesar 135.527,03 m<sup>3</sup>, naik 8,07 persen. Dan produksi kayu moulding sebesar 36.542,66 m<sup>3</sup>, atau naik 16,5 persen dibanding tahun 2015.

PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Produksi tembaga dan emas tahun 2016 cenderung meningkat. Produksi tembaga PT. Freeport tahun 2016 mencapai 1.063 juta pon atau mengalami peningkatan 41,36 persen. Sedangkan untuk produksi emas tahun 2016 mencapai 1.155 ribu ons, dimana produksinya justru turun 6,25 persen dibanding tahun 2015.

Selama tahun 2016, produksi listrik di Provinsi Papua mencapai 1.016,13 juta KWh dengan daya terpasang sebesar 239,02 ribu KWh. Dari seluruh produksi listrik yang ada 863,40 juta KWh listrik yang terjual, 5,42 juta KWh dipakai sendiri, sisanya sebanyak 57,09 juta KWh susut/hilang.

Selama lima tahun terakhir, jumlah pelanggan listrik PLN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah pelanggan listrik sebanyak 229.436, meningkat menjadi 356.082 pada tahun 2016 atau telah meningkat sebesar 55,20 persen dalam kurun waktu lima tahun. Pelanggan terbanyak berasal dari Kota Jayapura, sedangkan yang terkecil ada di Kabupaten Supiori. Sementara, masih banyak juga kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua yang belum menikmati listrik PLN hingga tahun 2016 ini.

**Gambar 10.1 Produksi Emas dan Tembaga PT Freeport Menurut Triwulan, 2015-2016**

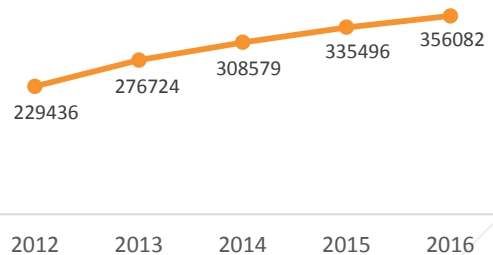


**Gambar 10.2 Energi Listrik Provinsi Papua Tahun 2016**

Energi	Volume
Daya Terpasang (Ribu KW)	239,02
Produksi Listrik (Juta KWh)	1.016,13
Listrik Terjual (Juta KWh)	863,40
Dipakai Sendiri (Juta KWh)	5,42
Susut/Hilang (Juta KWh)	57,09

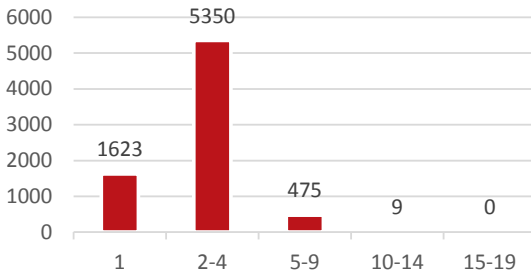
Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 10.3 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Papua, 2012 - 2016**



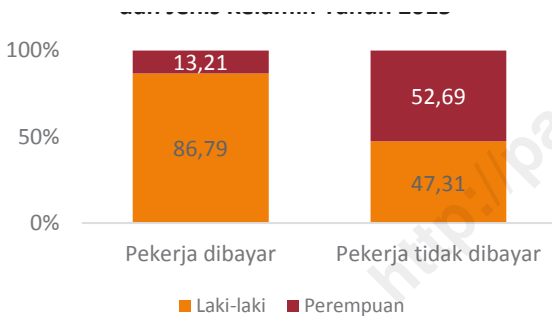
Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 11.1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2015**

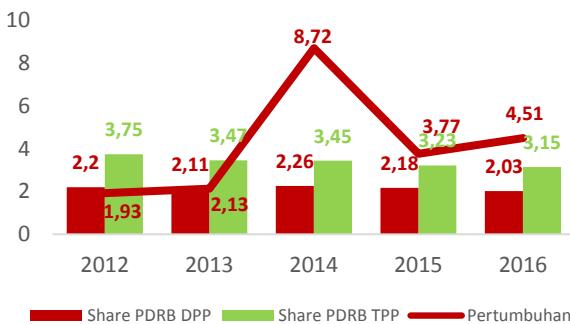


Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 11.2 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2015**



**Gambar 11.3 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Papua dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Papua, 2012-2016 (persen)**

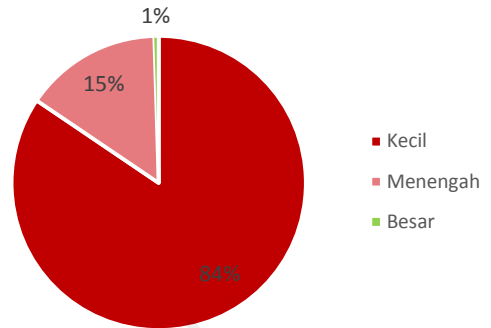


Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan yang ikut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di Papua, meskipun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap ekonomi Papua. Industri pengolahan yang tergolong ke dalam IMK adalah industri pengolahan yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang.

Sebagian besar IMK di Papua hanya memiliki 2-4 tenaga kerja yakni sebanyak 5.350 perusahaan. Sementara ada 1.623 perusahaan hanya mempunyai 1 tenaga kerja. Menurut status pekerja dan jenis kelamin, pekerja yang dibayar didominasi oleh pekerja laki-laki (86,79 persen), namun sebaliknya untuk pekerja tidak dibayar didominasi oleh perempuan (53,69 persen). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Papua masih rendah. Selama periode 2012-2016, kontribusi lapangan usaha Industri terhadap PDRB Dengan Pertambahan dan Penggalian (DPP) selalu turun. Begitu juga dengan kontribusinya terhadap PDRB Tanpa Pertambahan dan Penggalian (TPP) yang selalu menurun selama tiga tahun terakhir. Sementara, pertumbuhan lapangan usaha Industri meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,51 persen, setelah pada tahun 2015 melambat cukup dalam.

Perusahaan konstruksi di Papua tahun 2015 sebagian besar memiliki kualifikasi badan usaha konstruksi kecil. Persentase golongan perusahaan konstruksi kecil mencapai 84 persen atau 113.192 perusahaan. Golongan perusahaan konstruksi menengah ada 15 persen (20.181 perusahaan) dan perusahaan besar hanya 1 persen (656 perusahaan). Sebagian besar perusahaan konstruksi tersebut berada di Kota Jayapura.

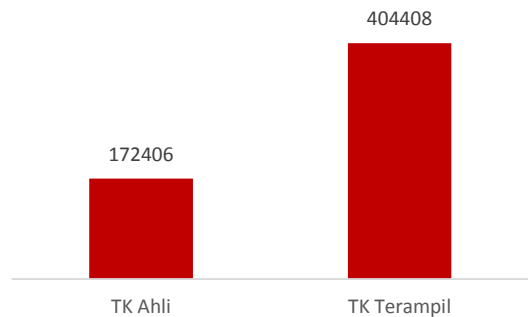
**Gambar 12.1** Persentase Perusahaan Konstruksi di Papua Menurut Jenis Golongan Tahun 2015



Sumber: Konstruksi Dalam Angka 2016

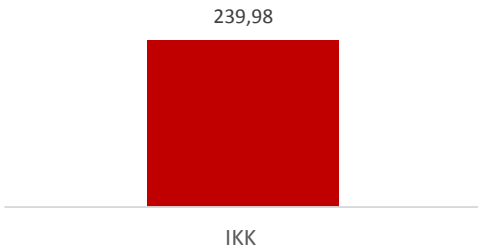
Sementara jumlah tenaga kerja terampil konstruksi di Papua lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja ahli konstruksi. Tahun 2016, tenaga terampil di Papua mencapai 404.408 orang, sedangkan untuk tenaga ahli ada 172.406 orang.

**Gambar 12.2** Banyaknya Tenaga Kerja Ahli Konstruksi dan Tenaga Kerja Terampil Konstruksi di Provinsi Papua Tahun 2016 (orang)



Sumber: Konstruksi Dalam Angka 2016

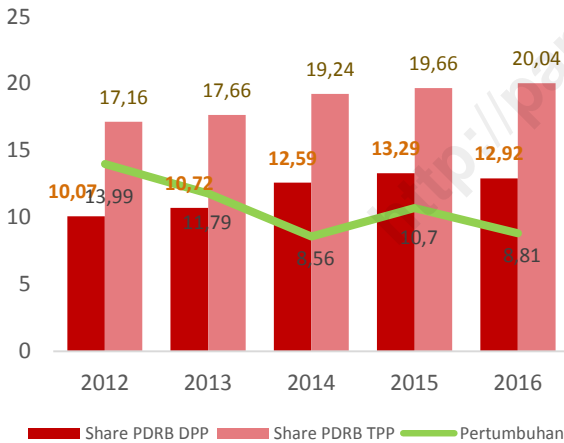
**Gambar 12.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Tahun 2016**



Sumber: Konstruksi Dalam Angka 2016

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Papua tahun 2016 sebesar 239,98. Angka IKK Papua merupakan IKK tertinggi di Indonesia. IKK menggambarkan bahwa tingkat kesulitan geografis Papua untuk membangun suatu bangunan konstruksi 2,39 kali lebih sulit dibanding Jawa Timur sebagai provinsi acuan. Jika dirinci per kabupaten/kota di Papua maka IKK paling tinggi tahun 2016 ada di Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 454,67.

**Gambar 12.4 Kontribusi Lapangan Usaha Konstruksi Terhadap PDRB Papua dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Papua, 2012-2016 (persen)**



Kontribusi lapangan usaha Konstruksi terhadap PDRB Tanpa Pertambangan dan Penggalian (TPP) Papua selama periode 2012-2016 selalu meningkat. Namun, kontribusinya terhadap PDRB Dengan Pertambangan dan Penggalian (DPP) justru turun pada tahun 2016. Begitu pula dengan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2016 juga sempat melambat menjadi 8,18 persen setelah tahun 2015 meningkat sebesar 10,7 persen.



Pariwisata yang dimiliki Papua dapat dikatakan cukup lengkap. Misalnya, wisata sejarah, keindahan alam flora dan fauna, pantai dan pegunungan serta berbagai event kebudayaan tahunan menjadikan Papua sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup menarik dikunjungi. Untuk itu perlu diimbangi dengan tersedianya penginapan/akomodasi yang memadai dalam menunjang pariwisata di Papua.

Pada tahun 2016, terjadi sedikit penurunan jumlah hotel dari 218 hotel menjadi 215 hotel. Menurunnya jumlah hotel berdampak pada berkurangnya tenaga kerja di sektor perhotelan. Sebaliknya, penurunan jumlah hotel berbanding terbalik dengan jumlah kamar yang tersedia. Jumlah kamar justru mengalami sedikit peningkatan. yang diikuti oleh peningkatan jumlah tempat tidur sebesar 0,15 persen menjadi 8.405 tempat tidur.

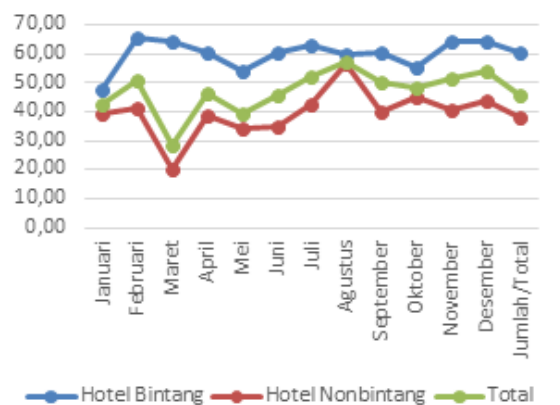
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Papua tahun 2016 tercatat sebesar 60,80 persen. Artinya setiap 100 malam kamar yang tersedia pada hotel bintang, sebanyak 60,80 malam kamar terpakai/terhuni oleh tamu hotel, baik tamu domestik maupun mancanegara. Sementara TPK hotel non bintang sebesar 38,20 persen. Selama tahun 2016, TPK hotel bintang tertinggi tercatat pada bulan Februari 2016 sebesar 65,34 persen, sedangkan hotel non bintang tertinggi tercatat pada bulan Agustus 2016 sebesar 56,74 persen.

**Tabel 13.1 Statistik Hotel Tahun 2013-2016**

Indikator	2013	2014	2015	2016
Jumlah Hotel	209	210	218	215
- Bintang	24	24	26	28
- Non Bintang	172	186	192	187
Jumlah Kamar	5.132	5.578	5.843	5.887
- Bintang	1.655	1.781	1.873	1.909
- Non Bintang	3.477	3.797	3.970	3.978
Jumlah Tempat Tidur	7.382	7.947	8.392	8.405
Tingkat Penghunian Kamar	42,78	40,11	43,60	46,08
- Bintang	49,81	49,18	52,29	60,80
- Non Bintang	37,59	34,77	36,31	38,20
Jumlah Tenaga Kerja	3.245	3.260	3.289	3.285

Sumber: Tingkat Hunian Kamar dan Hotel Penginapan di Provinsi Papua Tahun 2016

**Gambar 13.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Papua Tahun 2016**

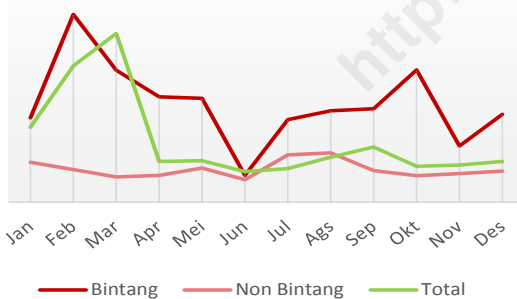


**Tabel 13.2 Statistik Pariwisata Pada Jasa Akomodasi Tahun 2016**

Uraian	Bintang	Non Bintang	Total
Rata-rata lama menginap tamu WNA	3,41	4,59	3,63
Rata-rata lama menginap tamu WNI	1,91	1,96	1,93
Rata-rata lama menginap tamu	1,95	1,97	1,96
Jumlah tamu asing	12.859	2.954	15.814
Jumlah tamu Indonesia	416.083	468.672	884.755
Jumlah tamu	428.942	471.626	900.569

Sumber: Tingkat Hunian Kamar dan Hotel Penginapan di Provinsi Papua Tahun 2016

**Gambar 13.2 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Papua Tahun 2016**



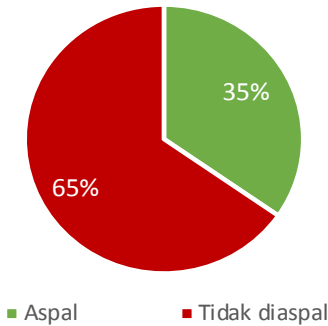
Sumber: Tingkat Hunian Kamar dan Hotel Penginapan di Provinsi Papua Tahun 2016

Jumlah tamu hotel selama tahun 2016 di Provinsi Papua berjumlah 900.569 orang yang terdiri dari 15.814 tamu asing dan 884.755 tamu domestik. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tamu mengalami peningkatan sebesar 64,7 persen. Jika dirinci menurut kualifikasi hotel, tamu asing lebih banyak menginap di hotel bintang, yaitu mencapai 81,31 persen dari total tamu asing yang menginap. Sebaliknya tamu domestik lebih banyak menginap di hotel non bintang, yaitu sebanyak 52,97 persen.

Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang pada tahun 2016 selama 1,95 hari. Nilai ini lebih rendah dari rata-rata lama menginap tamu pada tahun sebelumnya. Untuk hotel non bintang, rata-rata lama menginap tamu pada tahun 2015 sebesar 1,97 hari, nilai ini menurun 0,74 hari bila dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dirinci menurut asal tamu, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang selama 3,41 hari dan hotel non bintang selama 4,59 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik pada hotel bintang selama 1,91 hari dan pada hotel non bintang selama 1,96 hari.

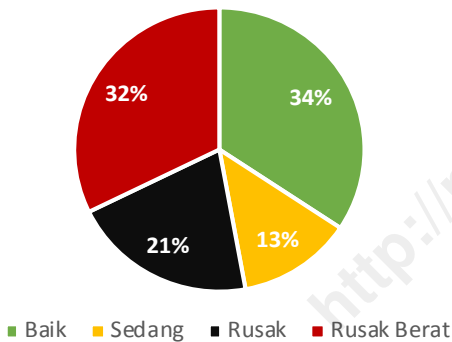
Selama tahun 2016, rata-rata lama menginap tamu Asing dan domestik di Papua paling lama terjadi pada bulan Agustus selama 2,43 hari. Dirinci menurut kualifikasi hotel, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang paling lama tercatat pada bulan Mei mencapai 2,43 hari. Sementara rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang paling lama tercatat pada bulan Agustus selama 2,67 hari.

**Gambar 14.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Provinsi Papua, 2016**



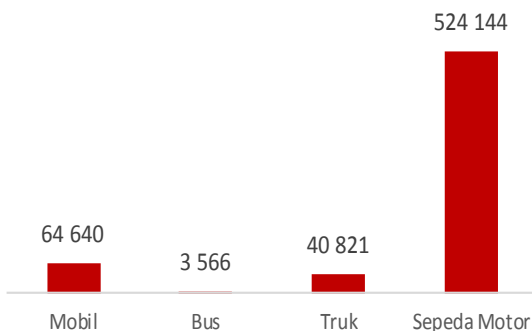
Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 14.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Papua, 2016**



Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 14.3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua (unit), 2016**



Sumber: Papua Dalam Angka 2017

Kondisi geografis Provinsi Papua sangatlah kompleks seperti dataran rendah, laut, maupun dataran tinggi/ pegunungan. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menghubungkan wilayah di Papua.

Salah satu prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran transportasi di darat adalah kondisi jalan yang baik. Mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain yang lancar tercipta melalui akses jalan yang baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, panjang jalan di Papua hingga tahun 2016 adalah 2.957,64 km. Dari total panjang jalan tersebut, lebih dari separuhnya (65 persen) tidak diaspal. Perbandingan jalan yang baik dan rusak berat hampir sama. Ada 32 persen jalan yang masih dalam kondisi baik, dan ada 34 persen yang rusak berat.

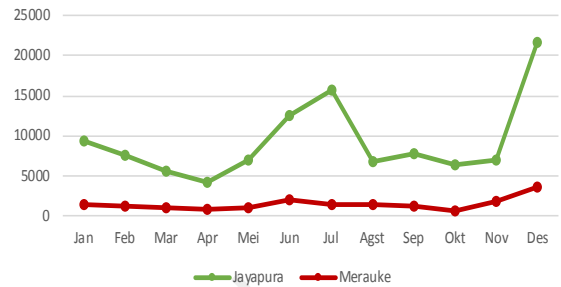
Jumlah kendaraan bermotor di Papua sebagian besar didominasi oleh sepeda motor. Hingga tahun 2016, jumlah sepeda motor mencapai 524.144 unit. Sementara mobil dan truk Jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura dan Merauke sepanjang tahun 2016 mencapai 129.096 orang atau turun 3,77 persen dibanding tahun 2015. Penumpang lebih banyak berasal dari Pelabuhan Jayapura dibanding Merauke. Lonjakan penumpang terjadi pada bulan Juli dan Desember. Pada

bulan Juli bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri, sementara Desember bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini kemungkinan disebabkan orang cenderung menggunakan jasa angkutan laut untuk rute yang disinggahi kapal. Lonjakan penumpang bahkan sudah mulai terjadi sejak dua bulan sebelum hari raya.

Sementara jumlah kunjungan kapal ke Pelabuhan Jayapura dan Merauke selama tahun 2016 sebanyak 144.619 kunjungan atau turun 12,21 dari tahun 2015. Penumpang lebih banyak datang ke Pelabuhan Jayapura dibanding Merauke. Lonjakan kedatangan penumpang paling banyak terjadi di bulan Juli yang bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan penumpang bahkan sudah mulai terjadi sejak dua bulan sebelum hari raya.

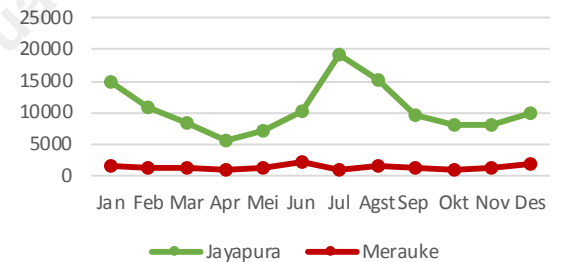
Volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura dan Merauke selama tahun 2016 sebesar 1,31 ribu ton juga mengalami penurunan 58,51 persen dibanding tahun 2015. Barang yang paling banyak dimuat di Pelabuhan Jayapura adalah Kayu Gergajian, sementara di Merauke berupa Barang Campuran. Volume barang yang dibongkar pada kedua pelabuhan tahun 2016 sebesar 1,18 juta ton atau turun 61,73 persen dari tahun 2015. Barang yang paling banyak dibongkar di Pelabuhan Jayapura berupa Barang Campuran, sementara di Merauke berupa Container Isi.

**Gambar 14.4** Perkembangan Penumpang Berangkat Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Merauke, 2016 (orang)



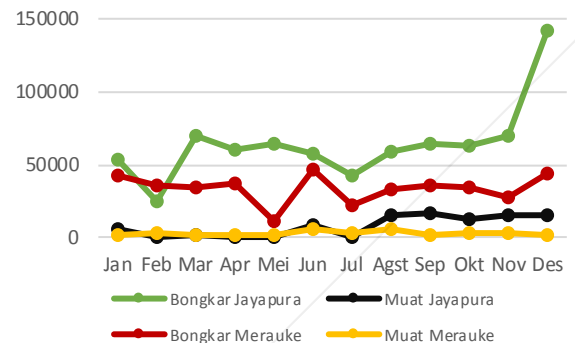
Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 14.5** Perkembangan Penumpang Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Merauke, 2016 (orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 14.6** Perkembangan Bongkar Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Merauke, 2016 (Ton)



Sumber: BPS Provinsi Papua

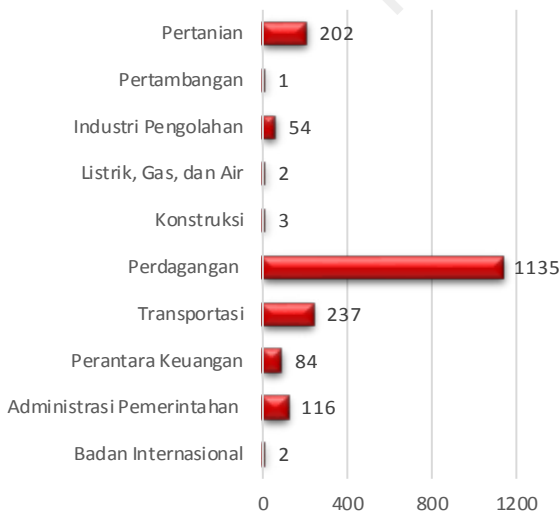


**Tabel 15.1 Statistik Perbankan Provinsi Papua, Tahun 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016
Dana Bank (Triliun Rp)	41,93	45,74	36,58
- Bank Pemerintah	34,11	36,91	29,10
- Bank Swasta Nasional	7,82	7,92	7,13
- BPR	-	0,91	0,34
Tabungan (Triliun Rp)	33,72	36,23	20,79
Giro (Triliun Rp)	9,49	9,51	9,36
Deposito (Triliun Rp)	7,51	7,62	8,49
Kredit Bank (Triliun Rp)	20,53	22,26	25,17
- Bank Pemerintah	17,32	18,86	21,14
- Bank Swasta Nasional	3,21	3,39	3,17
- Bank Asing & Campuran	-	-	-
- BPR	-	0,78	0,86
Jumlah Bank (unit)	262	323	406
Jumlah Koperasi (unit)	2.420	-	-

Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 15.1 Posisi Kredit Usaha Mikro Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah), Tahun 2016**



Sumber: Papua Dalam Angka 2017

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, perbankan juga menjadi sarana berinvestasi yang aman. Peran perbankan tersebut sangat vital dalam mendukung proses pembangunan.

Selama tiga tahun terakhir jumlah bank terus meningkat, dari 262 bank pada tahun 2014 menjadi 406 pada tahun 2016. Dari 406 bank, terdapat 205 bank yang merupakan bank pemerintah. Selain dari itu merupakan Bank Swasta dan Bank Pembangunan Rakyat (BPR).

Jumlah dana bank, tabungan, dan giro pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Sementara deposito dan kredit bank mengalami peningkatan pada tahun 2016. Dilihat dari posisi aktiva di masing-masing, Bank Pemerintah memiliki jumlah aktiva terbesar dibandingkan Bank Swasta Nasional dan BPR yaitu sebesar 29,10 triliun rupiah pada 2016.

Total kredit usaha mikro di Papua tahun 2016 sebesar 1.836 Miliar rupiah. Kredit usaha terbesar terdapat pada lapangan usaha Perdagangan (61,82 persen). Selanjutnya ada pada lapangan usaha Transportasi (12,91 persen) dan Pertanian (11 persen). Sementara lapangan usaha Konstruksi hanya 0,05 persen.

Pada tahun 2016, jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

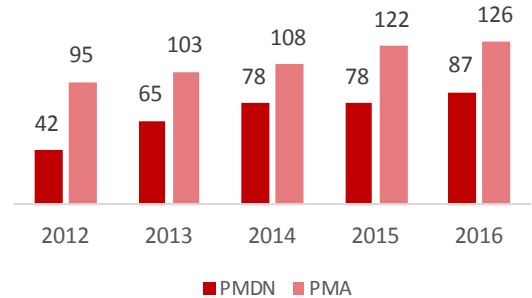


mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Dimana terdapat 87 perusahaan PMDN dan 126 perusahaan PMA di Papua. Peningkatan jumlah perusahaan pada tahun 2016 juga diikuti oleh peningkatan nilai investasi. Nilai investasi PMDN tahun 2016 mencapai 52,51 triliun rupiah, dimana sekitar 60,73 persen berinvestasi pada lapangan usaha Perkebunan. Sisanya tersebar pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Jasa Lainnya, dan Industri. Sementara nilai investasi PMA mencapai 70,04 triliun rupiah. PMA lebih banyak diinvestasikan pada lapangan usaha Jasa Lainnya, Pertambangan dan Perkebunan dimana masing-masing sebesar 44,10 persen; 21,06 persen; dan 17,88 persen.

Secara total, jumlah tenaga kerja di proyek PMDN dan PMA meningkat pada tahun 2016. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk PMA. Sementara untuk Tenaga Kerja Asing (TK Asing) pada PMDN tahun 2016 justru menurun dari tahun 2015.

Realisasi TKI dan TK Asing pada proyek PMDN paling banyak terserap pada lapangan usaha Pertambangan. Sementara, realisasi TKI dan TK Asing pada proyek PMA paling banyak terserap pada lapangan usaha Perkebunan.

**Gambar 15.2 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Provinsi Papua, Tahun 2012-2016**



Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Tabel 15.2 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua, Tahun 2012-2016**

Tahun	PMDN (Milyar Rp)	PMA (Juta US \$)
2012	8.353,52	11.120,02
2013	10.679,55	18.545,11
2014	19.137,38	29.563,67
2015	46.650,71	47.393,67
2016	52.510,30	70.038,82

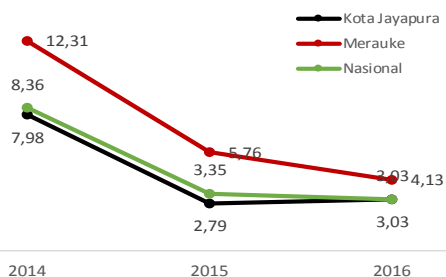
Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Tabel 15.3 Realisasi Jumlah Tenaga Kerja di Proyek PMDN dan PMA Tahun 2012-2016**

Tahun	PMDN		PMA	
	TKI	TK Asing	TKI	TK Asing
2012	11.113	34	33.887	862
2013	40.992	39	34.281	971
2014	42.091	63	36.405	1.028
2015	14.640	70	39.886	1.033
2016	16.170	61	61.194	1.703

Sumber: Papua Dalam Angka 2017

**Gambar 16.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Jayapura, Merauke, dan Nasional Tahun 2014 -2016**



Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

**Tabel 16.2 Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Tahun Kalender Kota Jayapura Tahun 2016 (persen)**

Kelompok/Subkelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
UMUM/TOTAL	4,13
Bahan Makanan	1,63
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	1,00
Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	0,34
Sandang	0,07
Kesehatan	0,08
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,02
Transportasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	0,99

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

**Tabel 16.3 Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Tahun Kalender Merauke Tahun 2016 (persen)**

Kelompok/Subkelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
UMUM/TOTAL	0,82
Bahan Makanan	-2,75
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	0,97
Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	1,13
Sandang	0,00
Kesehatan	0,10
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,06
Transportasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	1,32

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

Pada tahun 2016, Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 4,13 persen. Sedangkan Kabupaten Merauke pada tahun 2016 mengalami inflasi sebesar 3,03 persen. Angka inflasi pada hakikatnya menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan daya belinya.

Inflasi Kota Jayapura dan Merauke di tahun 2016 menunjukkan arah yang berlawanan. Inflasi Kota Merauke cenderung mengalami penurunan yang cukup tajam sementara Inflasi Kota Jayapura justru sebaliknya. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi di Kota Jayapura lebih tinggi.

Komoditas dominan penyumbang inflasi pada tahun 2016 di Kota Jayapura antara lain: angkutan udara, ekor kuning, bawang merah, nasi dengan lauk, kangkong, talas, tarif ponsel dan sebagainya. Sementara komoditas yang dominan menahan laju inflasi antara lain: bensin, cabai merah, minyak goreng, buncis, teri, besi beton, tahu mentah dan lain-lain.

Sedangkan di Merauke, komoditas dominan penyumbang inflasi di tahun 2016 antara lain: angkutan udara, sewa rumah, bawang merah, daging babi, bawang putih dan lain-lain. Sementara komoditas yang dominan menahan laju inflasi selama tahun 2016 adalah: cabai rawit, kangkong, kacang panjang, bayam cabai merah.

Nilai Tukar Petani (NTP) Papua selama tahun

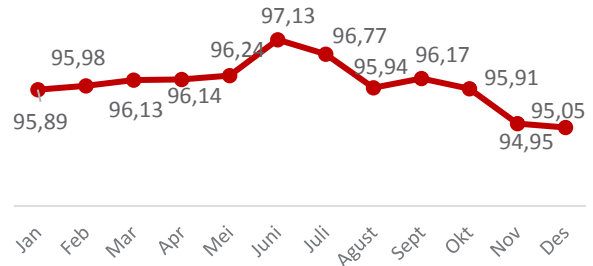
2016 menunjukkan penurunan. NTP berada dibawah 100 atau defisit. Artinya, tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan kesejahteraan petani di tahun 2012 (tahun dasar penghitungan NTP). Hal ini disebabkan oleh biaya produksi dan kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi petani lebih tinggi dari kenaikan harga hasil produksi petani.

NTP dibentuk dari Indeks Harga Diterima (It) dan Indeks Harga Dibayar (Ib). Indeks harga diterima petani (It) gabungan Provinsi Papua pada Januari-Desember 2016 berkisar antara 113,61 hingga 118,23. Dari lima subsektor, subsektor Perikanan memiliki It tertinggi sebesar 124,97. Sementara It terendah terdapat pada subsektor Tanaman Pangan.

Di tahun 2016, indeks harga dibayar petani (Ib) selalu lebih tinggi dari angka indeks harga diterima petani (It), yaitu berada pada kisaran 118,48 hingga 124,51. Ib subsektor Horikultura dan Tanaman Pangan memiliki rata-rata tertinggi di tahun 2016 yang tercatat mencapai 122,89 dan 122,63.

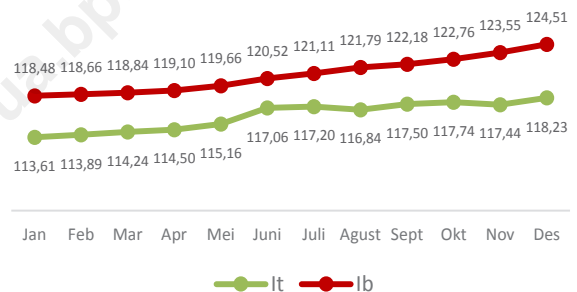
Inflasi perdesaan Papua tertinggi terjadi pada Desember 2016 yang tercatat sebesar 0,96 persen dan inflasi perdesaan terendah terjadi pada Maret 2016 sebesar 0,18 persen.

**Gambar 16.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Tahun 2016**



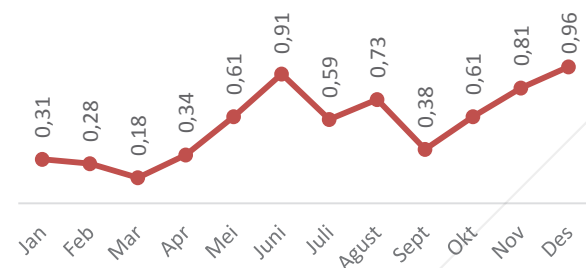
Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

**Gambar 16.5 Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Provinsi Papua Januari-Desember 2016**



Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

**Gambar 16.6 Inflasi Perdesaan Provinsi Papua Januari-Desember 2016**



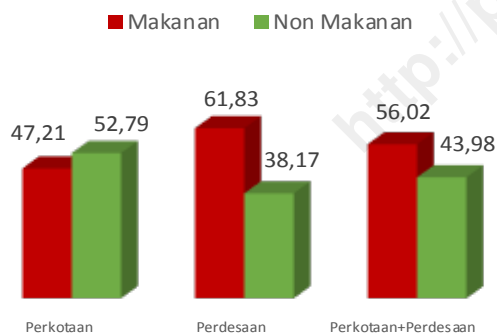
Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Papua 2016

**Tabel 17.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, Provinsi Papua Tahun 2016**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Makanan	524 592	56,02
Bukan Makanan	411 795	42,95
Perumahan	280 112	68,02
Barang dan Jasa	84 465	20,51
Pakaian	15 930	3,87
Barang tahan lama	15 220	3,70
Pajak, pungutan, dan asuransi	9 919	2,41
Keperluan pesta & upacara/ kenduri	6 150	1,49
Jumlah	936 387	100,00

Sumber: Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Papua 2016

**Gambar 17.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Papua Tahun 2016**



Sumber: Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Papua 2016

Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Papua setiap bulannya sebesar 936.387 rupiah. Dari jumlah tersebut, 56,02 persen (524.592 rupiah) dialokasikan untuk konsumsi makanan, sisanya 42,95 persen (411.795 rupiah) untuk konsumsi bukan makanan. Pada konsumsi bukan makanan, proporsi pengeluaran terbesar untuk perumahan sebesar 68,02 persen dari total pengeluaran bukan makanan.

Jika dicermati, terdapat perbedaan pola pengeluaran konsumsi antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Persentase pengeluaran konsumsi makanan penduduk perkotaan lebih rendah daripada penduduk perdesaan. Di perkotaan, pengeluaran konsumsi untuk makanan hanya sebesar 47,21 persen, sisanya untuk konsumsi bukan makanan. Sementara, di perdesaan, 61,83 persen pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan.

Perbedaan konsumsi yang terlihat antara masyarakat perkotaan dan perdesaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan yang relatif lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan. Sebagaimana Hukum Engel menyatakan bahwa pada masyarakat yang lebih sejahtera, pengeluaran konsumsi untuk makanan akan menurun, sebaliknya pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan akan mengalami peningkatan.

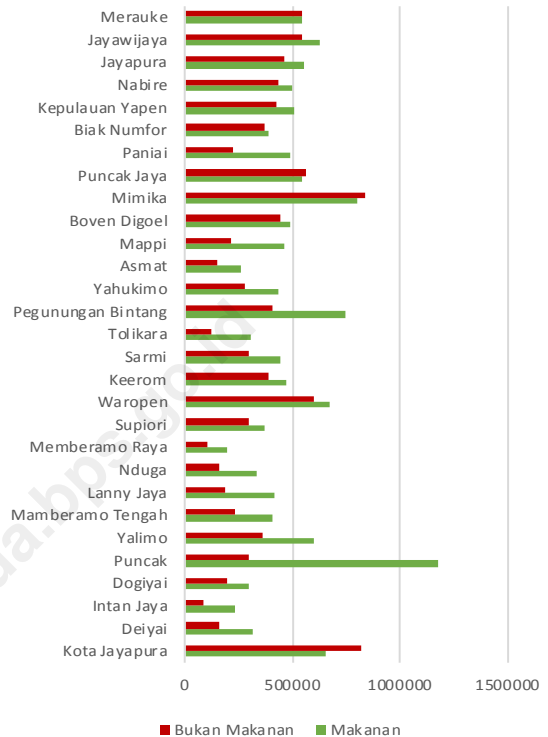
Pola pengeluaran konsumsi penduduk di Kabupaten Merauke, Mimika, dan Kota

Jayapura berbeda dengan pola konsumsi penduduk Papua pada umumnya. Pada tiga kabupaten tersebut, persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dibandingkan konsumsi makanan, dimana proporsi terbesar ada di Kota Jayapura (55,62 persen).

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Papua tahun 2016 masing-masing sebesar 1.764,80 kkal dan 38,40 gram per kapita per hari. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi menganjurkan rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi. Mengacu pada peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Papua pada tahun 2016 masih berada di bawah standar gizi yang dianjurkan.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk perkotaan jauh lebih baik daripada penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk di perkotaan masing-masing sebesar 1.832,18 kkal dan 53,83 gram per kapita per hari; sedangkan di perdesaan masing-masing sebesar 1.740,80 kkal dan 32,91 gram per hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi kalori dan protein penduduk antara lain: daya beli masyarakat, variasi jenis komoditi makanan yang tersedia di suatu wilayah, dan budaya masyarakat setempat.

**Gambar 17.2** Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Papua 2016

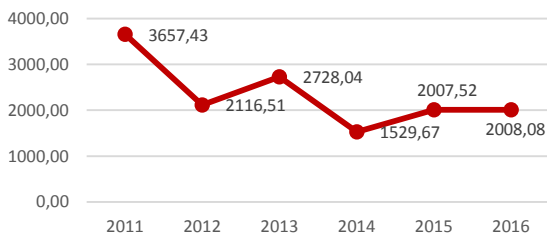
**Tabel 17.2** Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2016

Konsumsi	Kota	Desa	Kota + Desa
Kalori (kkal)	1 832,18	1 740,80	1 764,80
Protein (gram)	53,83	32,91	38,40

Sumber: Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Papua 2016



**Gambar 18.1 Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Juta US\$)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 18.2 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2-Digit Provinsi Papua Tahun 2016**

Golongan Barang	Volume (Kg)	Nilai FOB (US\$)
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	1 114 400 000	1 907 955 250
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	144 500 020	96 181 410
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	6 314	59 166
Lemak Nabati dan Hewani (HS15)	47 955	79 907
Lainnya	584 338	3 802 327
<b>Jumlah</b>	<b>1 259 538 627</b>	<b>2 008 078 061</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 18.3 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan, Provinsi Papua Tahun 2016**

Pelabuhan	Volume (Kg)	Nilai FOB (US\$)
Amamapare	1 114 434 758	1 908 230 867
Bade	55 611 987	44 572 578
Serui	88 022 880	51 155 185
Frans Kaisepo	2 073	2 303 910
Jayapura	1 452 260	1 706 871
Merauke	900	570
Sentani	13 769	108 080
<b>Jumlah</b>	<b>1 259 538 627</b>	<b>2 008 078 061</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

Perkembangan ekspor di Papua menunjukkan penurunan yang cukup tajam sejak tahun 2011 hingga 2014. Namun demikian, terjadi peningkatan ekspor pada tahun 2015-2016. Nilai ekspor Papua tahun 2016 sebesar US\$ 2.008,08 juta dengan berat mencapai 1,26 juta ton. Di tingkat nasional, ekspor Indonesia tahun 2016 senilai US\$ 145.186,2 juta. Dengan demikian, sumbangan nilai ekspor Papua terhadap ekspor nasional sebesar 1,38 persen. Kawasan Asia rupanya masih cukup menjanjikan untuk pangsa ekspor Papua dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, sebesar 94,12 persen (US\$ 1.890,09 juta) dari total ekspor Papua ditujukan ke kawasan Asia, seperti Jepang, India, Tiongkok, Filipina, Korea Selatan.

Volume ekspor konsentrat tembaga di tahun 2016 mencapai 1.114,4 ribu ton. Angka tersebut naik 9,44 persen dari volume ekspor tahun 2015 sebesar 1.015,24 ribu ton. Selama enam tahun terakhir ekspor konsentrat tembaga terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya 525,74 ribu ton. Hal tersebut disebabkan oleh berlakunya UU Minerba yang melarang ekspor bahan mentah ke luar Papua.

Konsentrat tembaga merupakan produk unggulan ekspor Papua sehingga Pelabuhan Amamapare di Mimika dijadikan sebagai pintu gerbang perdagangan luar negeri utama di Papua. Pada tahun 2016, ekspor yang keluar dari pelabuhan tersebut senilai US\$ 1.908,23 juta atau mencapai 95,03 persen dari total ekspor Papua di tahun 2016. Sisanya keluar melalui Pelabuhan

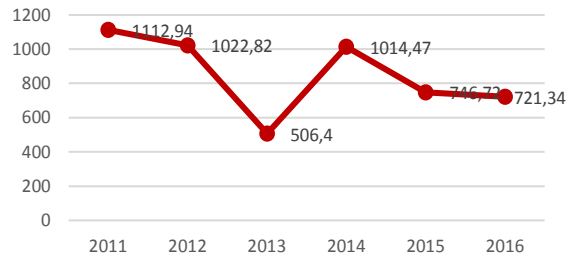
Serui (2,55 persen), Pelabuhan Bade (2,22 persen), Pelabuhan Udara Frans Kaisepo (0,11 persen), Pelabuhan Jayapura (0,09 persen), serta Bandara Sentani dan Pelabuhan Merauke (0,01 persen).

Dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan impor Indonesia cukup stabil. Pada tahun 2016, andil impor Papua terhadap total impor Indonesia sebesar 0,53 persen dimana total impor Papua senilai US\$ 721,34 juta dan total impor Indonesia senilai US\$ 135.652,8 juta. Impor Papua tahun 2016 terdiri atas impor migas senilai US\$ 135,89 juta (18,84 persen) dan impor nonmigas senilai US\$ 585,45 juta (81,16 persen).

Sebanyak 97 persen barang impor dari total impor Papua tiap tahunnya masuk melalui Pelabuhan Amamapare. Besarnya nilai impor yang masuk melalui Pelabuhan Amamapare di Mimika dikarenakan mayoritas barang yang diimpor adalah barang yang diimpor oleh PT. Freeport Indonesia.

Neraca perdagangan Papua terus mengalami surplus selama enam tahun terakhir. Ini berarti nilai ekspornya melebihi nilai impornya. Dengan nilai ekspor sebesar US\$ 2.008,08 juta dan impor senilai US\$ 721.340,71 juta, Papua memperoleh surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 1.286,74 juta. Surplus tersebut meningkat 2,06 persen dibandingkan surplus tahun sebelumnya akibat meningkatnya nilai ekspor dan ditambah dengan turunnya nilai impor. Meningkatnya permintaan konsentrat tembaga merupakan indikator membaiknya ekonomi secara global.

**Gambar 18.2 Perkembangan Impor Provinsi Papua Tahun 2010-2015 (Juta US\$)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 18.3 Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Provinsi Papua, Tahun 2016**

Pelabuhan	Volume (Kg)	Nilai CIF (US\$)
Amamapare	370 482 728	714 927 608
Merauke	154	1 486
Jayapura	9 233 227	1 450 602
Sentani	46 500	4 961 018
Jumlah	379 762 609	721 340 714

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 18.4 Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Provinsi Papua, Tahun 2016**

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
2011	3 657 427 418	1 112 944 378	2 544 483 040
2012	2 116 512 789	1 022 817 342	1 093 695 447
2013	2 728 043 282	506 402 756	2 221 640 526
2014	1 529 674 059	1 014 472 317	515 201 742
2015	2 007 516 930	746 723 691	1 260 793 239
2016	2 008 078 061	721 340 714	1 286 737 347

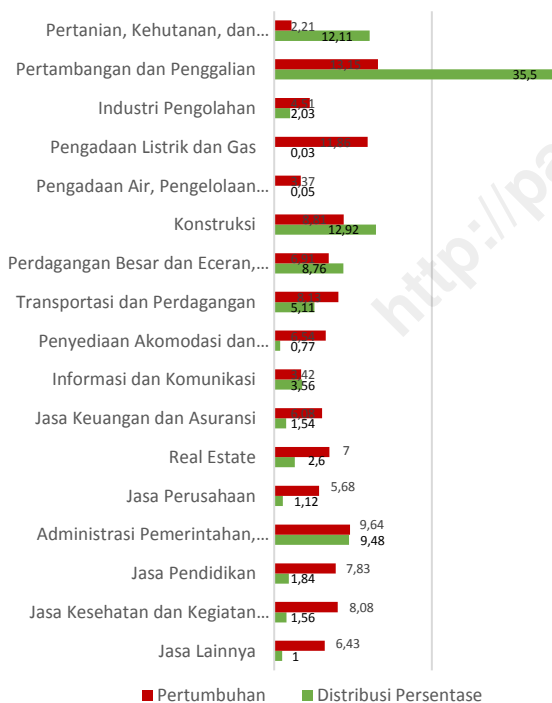
Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 19.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Provinsi Papua Tahun 2012-2016 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDRB		Laju (%)
	ADHB	ADHK	
2012	112.812,56	107.890,94	1,72
2013	122.857,17	117.118,82	8,55
2014	133.329,98	121.391,23	3,65
2015	151.201,49	130.459,91	7,47
2016	178.370,34	142.476,35	9,21

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 19.1 Distribusi Persentase dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2016 (persen)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

Membbaiknya kondisi perekonomian Papua terlihat dari PDRB yang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yang diikuti pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.

Perekonomian Papua tahun 2016 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 178,37 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 27,16 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 12,01 triliun rupiah atau meningkat 9,21 persen dari tahun 2015. Perbedaan PDRB ADHB dan ADHK ini terjadi karena PDRB ADHB dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan harga. Sedangkan PDRB ADHK hanya dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi saja. Sehingga mencerminkan perkembangan produksi riil yang ada di Provinsi Papua.

Lapangan usaha yang berkontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Papua tahun 2016 adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,5 persen. Kontributor tertinggi lainnya adalah Konstruksi (12,92 persen) serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,11 persen). Sementara yang terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2016 sebesar 9,21 persen, naik 1,27 persen dibanding tahun 2015. Pertumbuhan lapangan usaha tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,15 persen.

Laju pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,86 persen. Sementara pertumbuhan terendah ada pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,21 persen. Jika lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan dihilangkan, ternyata pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2016 melambat 1,42 persen dibanding tahun 2015, menjadi 6,52 persen.

Dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,3 persen akibat dikeluarkannya ijin beroperasi PT Freeport setelah sempat terhenti. Sementara, pertumbuhan terkecil ada pada komponen perubahan inventori yang hanya 0,24 persen.

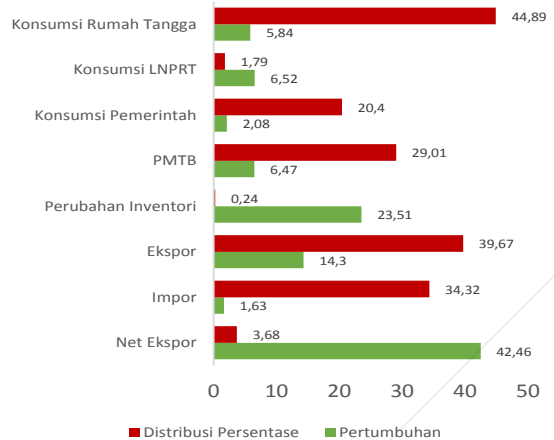
Struktur ekonomi Papua tahun 2016 menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (44,89 persen). Ini berarti produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Komponen pengeluaran tertinggi selanjutnya untuk ekspor mencapai 39,67 persen. Besarnya ekspor ini dipengaruhi oleh ekspor hasil tambang dari PT Freeport ke luar negeri seiring dengan laju pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan yang juga tinggi pada tahun 2016. Sedangkan kontribusi terendah ada pada komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang hanya sebesar 1,79 persen.

**Tabel 19.2 PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Papua Tahun 2014-2016 (Milyar Rupiah)**

Komponen	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	65.393,76	71.699,21	80.062,23
Konsumsi LNPRT	2.592,80	2.908,33	3.184,67
Konsumsi Pemerintah	30.457,01	34.069,65	36.386,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto	41.549,46	46.796,44	51.749,80
Perubahan Inventori	-378,21	290,33	426,87
Ekspor Luar Negeri	59.062,14	63.039,56	70.754,13
Impor Luar Negeri	60.278,36	59.890,59	61.222,11
Net Ekspor Antar Daerah	-6.284,85	-4.542,47	6.560,29
P D R B	133.329,98	151.201,49	178.370,34

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 19.2 Distribusi Persentase dan Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Papua Tahun 2016 (persen)**



Sumber: BPS Provinsi Papua



**Tabel 20.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Di Sulawesi, Maluku dan Papua 2013-2016 (Milyar Rupiah)**

Provinsi	2013	2014	2015	2016
SULAWESI UTARA	71097.46	80667.63	91280.20	100537.36
SULAWESI TENGAH	79842.22	90246.27	107599.13	120232.87
SULAWESI SELATAN	258836.42	298033.80	340326.42	379209.48
SULAWESI TENGGARA	71041.25	78622.15	87765.98	96982.96
GORONTALO	22129.28	25193.78	28536.15	31823.65
SULAWESI BARAT	25249.49	29458.25	33017.33	35974.49
MALUKU	27834.44	31656.48	34344.12	37062.64
MALUKU UTARA	21439.49	24042.08	26640.79	29165.23
PAPUA BARAT	52997.66	58180.96	62889.89	66635.51
PAPUA	122857.17	133329.98	151201.50	178370.34

*\*) angka sementara    \*\*) angka sangat sementara*

Sumber: Badan Pusat Statistik

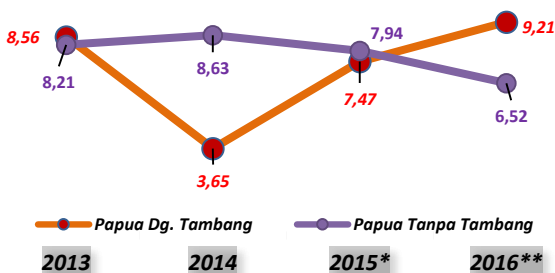
**Tabel 20.2 Kontribusi PDRB Terhadap Total PDRB Di Sulawesi, Maluku dan Papua 2013-2016 (Persen)**

Provinsi	2013	2014	2015*	2016**
SULAWESI UTARA	0.74	0.76	0.78	0.79
SULAWESI TENGAH	0.83	0.84	0.92	0.95
SULAWESI SELATAN	2.69	2.79	2.92	3
SULAWESI TENGGARA	0.74	0.74	0.75	0.77
GORONTALO	0.23	0.24	0.24	0.25
SULAWESI BARAT	0.26	0.28	0.28	0.28
MALUKU	0.29	0.30	0.29	0.29
MALUKU UTARA	0.22	0.23	0.23	0.23
PAPUA BARAT	0.55	0.54	0.54	0.53
PAPUA	1.28	1.25	1.30	1.41

*\*) angka sementara    \*\*) angka sangat sementara*

Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 20.1 Laju Pertumbuhan PDRB Papua Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2016 (persen)**



Kawasan timur Indonesia meliputi sepuluh provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Dibandingkan ke-9 provinsi tersebut, Provinsi Papua memiliki PDRB, luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar.

Selama empat tahun terakhir, kontribusi PDRB Papua dan Sulawesi Selatan terhadap total PDRB 34 provinsi selalu berada di atas satu persen. Share PDRB Papua terhadap total PDRB se-Indonesia sempat menurun pada tahun 2014. Penurunan tersebut diperkirakan karena adanya pembatasan ekspor bahan mentah produk pertambangan oleh pemerintah di tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 pemberian izin untuk melakukan ekspor yang dikeluarkan kembali. Karena itu sejak tahun 2015 kontribusi PDRB Papua terhadap nasional kembali meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2016 sebesar 9,21 persen, naik 1,27 persen dibanding tahun 2015. Pertumbuhan lapangan usaha tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 13,15 persen. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,86 persen. Sementara, lapangan usaha yang lain cenderung tumbuh stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan dihilangkan, ternyata pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2016



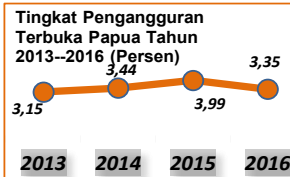
melambat 1,42 persen dibanding tahun 2015, menjadi 6,52 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tanpa tambang melambat, indikator lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin di Papua tahun 2016 yang justru menurun.

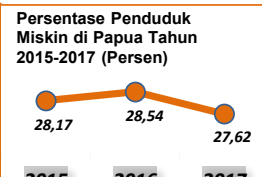
Selama tahun 2016, seluruh Kabupaten/Kota di Papua mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Mimika sebesar 12,84 persen. Sementara pertumbuhan terendah ada pada Kabupaten Supiori sebesar 4,43 persen. Mimika juga tampil sebagai kontributor terbesar PDRB Papua tahun 2016 sebesar 39,58 persen. Kontributor tertinggi selanjutnya adalah Kota Jayapura sebesar 14,88 persen, sementara kabupaten lainnya hanya memiliki kontribusi dibawah tujuh persen. Kabupaten dengan kontribusi paling kecil adalah Kabupaten Supiori sebesar 0,47 persen.

Tingginya nilai PDRB Papua ternyata belum diikuti dengan capaian IPM yang tinggi. Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih yang terendah diantara 34 provinsi di Indonesia (58,05). Meskipun, nilai ini sudah meningkat 0,80 persen dibanding tahun 2015 sekaligus merupakan pertumbuhan paling tinggi se-Indonesia (top mover).

Dari tingkat kabupaten/kota, IPM tertinggi ada di Kota Jayapura sebesar 78,56. Dengan nilai tersebut maka Kota Jayapura

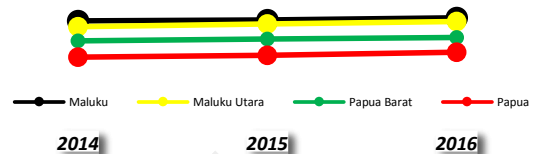


Sumber: BPS Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua

**Indeks Pembangunan Manusia se-Maluku dan Papua Tahun 2014-2016**



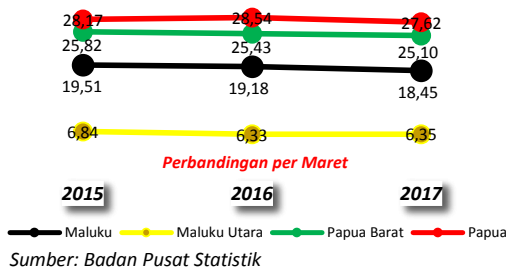
Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel 20.3 Distribusi Persentase dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Dengan Tambang Menurut 29 Kabupaten/Kota Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (persen)	Distribusi Persentase (persen)	IPM
Merauke	7,66	6,67	68,09
Jayawijaya	4,70	3,49	54,96
Jayapura	8,54	6,58	70,50
Nabire	6,88	4,95	66,64
Kepulauan Yapen	5,42	1,92	65,55
Biak Numfor	4,07	2,89	71,13
Paniai	7,54	1,91	54,34
Puncak Jaya	4,60	0,64	45,49
Mimika	12,84	39,58	71,64
Boven Digoel	4,83	2,24	59,35
Mappi	6,92	1,24	56,54
Asmat	6,18	1,04	47,31
Yahukimo	5,20	1,07	47,13
Pegunungan Bintang	8,25	0,84	41,90
Tolikara	4,68	0,71	47,11
Sarmi	6,78	1,18	61,27
Keerom	5,74	1,33	64,10
Waropen	9,48	0,94	63,10
Supiori	4,43	0,47	60,59
Mamberamo Raya	8,41	0,69	49,00
Nduga	6,56	0,52	26,56
Lanny Jaya	5,81	0,79	45,16
Mamberamo Tengah	5,72	0,51	44,15
Yalimo	6,83	0,52	44,95
Puncak	7,95	0,60	39,96
Dogiyai	7,56	0,59	53,32
Intan Jaya	7,17	0,58	44,82
Deiyai	7,91	0,61	48,50
Kota Jayapura	7,23	14,88	78,56

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Persentase Penduduk Miskin se-Maluku dan Papua Tahun 2015-2017 (Persen)**

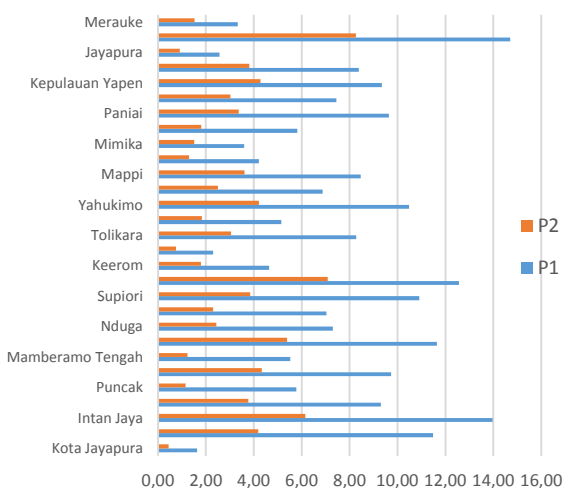


**Tabel 20.4 Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi, Maluku dan Papua 2014-2016 (000 jiwa)**

Provinsi	2014	2015	2016
Sulawesi Utara	208.23	208.54	202.82
Sulawesi Tengah	392.65	421.62	420.52
Sulawesi Selatan	864.30	797.72	807.03
Sulawesi Tenggara	342.26	321.88	326.86
Gorontalo	194.17	206.84	203.19
Sulawesi Barat	153.89	160.48	152.73
Maluku	316.11	328.41	327.72
Maluku Utara	82.64	79.90	74.68
Papua Barat	229.43	225.36	225.80
Papua	924.41	859.15	911.33

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar 20.3 P1 dan P2 Menurut Kabupaten/Kota (Keadaan Bulan September 2016)**



sudah tergolong memiliki IPM tinggi (70-80). Sementara kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Nduga sebesar 26,56.

Tidak hanya IPM terendah, Papua juga memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia per Maret 2017, dengan nilai mencapai 27,62 persen. Meskipun masih yang terendah, namun persentase turun 0,92 poin dibanding tahun 2016. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Papua juga lebih tinggi dibandingkan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Barat. Tahun 2017, jumlah penduduk miskin Papua justru bertambah padahal tahun 2016 jumlahnya sempat menurun.

Seperti persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya, yakni sebesar 14,71 dengan peningkatan garis kemiskinan 3,18 persen. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi juga terdapat di Kabupaten Jayawijaya, yakni sebesar 8,26 dengan peningkatan garis kemiskinan 13,56 persen. Peningkatan nilai P1 memberi indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Jayawijaya semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan peningkatan P2 di Kabupaten Jayawijaya mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskinnya semakin tinggi.

**Tabel: 1.1 Letak dan Posisi Geografi Provinsi Papua**

**1. Posisi Geografi Provinsi Papua 2°25'-9° Lintang Selatan, 130°-141° Bujur Timur.**

**2. Letak di Atas Permukaan Laut**

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Tinggi (mdpl)
Merauke	Merauke	3
Jayawijaya	Wamena	1 550
Jayapura	Sentani	88
Nabire	Nabire	10
Kepulauan Yapen	Serui	3
Biak Numfor	Biak	11
Paniai	Enarotali	1 770
Puncak Jaya	Mulia	*)
Mimika	Timika	3
Boven Digoel	Tanah Merah	*)
Mappi	Keppi	*)
Asmat	Agats	*)
Yahukimo	Dekai	*)
Pegunungan Bintang	Oksibil	*)
Tolikara	Karubaga	*)
Sarmi	Sarmi	*)
Keerom	Arso	*)
Waropen	Botawa	*)
Supiori	Sorendiweri	*)
Mamberamo Raya	Burmeso	*)
Nduga	Kenyam	*)
Lanny Jaya	Tiom	*)
Mamberamo Tengah	Kobakma	*)
Yalimo	Elelim	*)
Puncak	Ilaga	*)
Dogiyai	Kigamani	*)
Intan Jaya	Sugapa	*)
Deiyai	Tigi	*)
Kota Jayapura	Jayapura	3

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Tabel: 1.2 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
Merauke	47 406,90	14,98
Jayawijaya	2 331,19	0,74
Jayapura	14 390,16	4,55
Nabire	4 549,75	1,44
Kepulauan Yapen	4 936,37	1,56
Biak Numfor	13 017,45	4,11
Paniai	20 686,54	6,53
Puncak Jaya	2 446,50	0,77
Mimika	2 300,37	0,73
Boven Digoel	24 665,98	7,79
Mappi	23 178,45	7,32
Asmat	24 687,57	7,80
Yahukimo	15 057,90	4,76
Pegunungan Bintang	14 655,36	4,63
Tolikara	6 149,67	1,94
Sarmi	13 965,58	4,41
Keerom	9 015,03	2,85
Waropen	5 381,47	1,70
Supiori	634,24	0,20
Mamberamo Raya	28 034,87	8,86
Nduga	5 825,22	1,84
Lanny Jaya	3 439,79	1,09
Mamberamo Tengah	3 384,14	1,07
Yalimo	3 658,76	1,16
Puncak	5 618,84	1,78
Dogiyai	4 522,15	1,43
Intan Jaya	9 336,60	2,95
Deiyai	2 325,88	0,73
Kota Jayapura	950,38	0,30
Papua	316 553,07	100,00

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua

**Tabel: 1.3 Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Merauke	Merauke	20	168
Jayawijaya	Wamena	39	331
Jayapura	Sentani	19	144
Nabire	Nabire	15	85
Kepulauan Yapen	Serui	16	165
Biak Numfor	Biak	19	262
Paniai	Enarotali	10	70
Puncak Jaya	Mulia	26	302
Mimika	Timika	18	147
Boven Digoel	Tanah Merah	20	110
Mappi	Keppi	15	162
Asmat	Agats	23	221
Yahukimo	Dekai	51	518
Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277
Tolikara	Karubaga	46	545
Sarmi	Sarmi	19	110
Keerom	Arso	11	91
Waropen	Botawa	12	117
Supiori	Sorendiweri	5	38
Mamberamo Raya	Burmeso	9	59
Nduga	Kenyam	32	248
Lanny Jaya	Tiom	38	188
Mamberamo Tengah	Kobakma	5	59
Yalimo	Elelim	5	27
Puncak	Ilaga	8	80
Dogiyai	Kigamani	10	79
Intan Jaya	Sugapa	6	78
Deiyai	Tigi	5	67
Kota Jayapura	Jayapura	5	39
Jumlah		541	4787

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017



**Tabel: 1.4 Suhu Udara Rata-rata Maksimum dan Minimum Menurut Stasiun di Provinsi Papua Tahun 2016**

Stasiun	Suhu Udara Maksimum (°C)	Suhu Udara Minimum (°C)	Rata-Rata Suhu Udara (°C)
Merauke	31.70	24.40	27.50
Wamena	26.50	16.10	19.80
Sentani	32.50	19.80	27.80
Nabire	31.80	24.10	27.60
Serui	31.10	24.40	27.50
Biak	30.30	25.00	27.20
Enarotali	25.30	15.20	19.00
Timika	31.40	23.60	26.60
Tanah Merah	31.70	24.40	27.10
Sarmi	31.40	23.70	31.80
Dok II Jayapura	31.50	25.50	22.60
Genyem	31.80	22.60	26.90

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017



**Tabel: 2.1 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2016**

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pemerintah Provinsi Papua	4.215	3.353	7.568
Pemerintah Kabupaten/Kota			
Merauke	2.915	3.176	6.091
Jayawijaya	2.634	1.441	4.075
Jayapura	2.251	2.300	4.551
Nabire	2.928	2.273	5.201
Kepulauan Yapen	2.528	1.805	4.332
Biak Numfor	2.685	2.313	4.998
Paniai	1.756	726	2.482
Puncak Jaya	1.472	504	1.976
Mimika	2.157	2.655	4.812
Boven Digoel	1.296	853	2.149
Mappi	1.858	1.120	2.978
Asmat	1.731	891	2.622
Yahukimo	1.949	576	2.525
Pegunungan Bintang	1.762	665	2.427
Tolikara	1.805	555	2.360
Sarmi	1.144	747	1.891
Keerom	1.663	1.367	3.030
Waropen	1.342	743	2.085
Supiori	1.420	1.032	2.452
Mamberamo Raya	1.040	436	1.476
Nduga	702	332	1.034
Lanny Jaya	1.676	576	2.252
Mamberamo Tengah	1.195	503	1.698
Yalimo	1.103	528	1.631
Puncak	1.431	477	1.908
Dogiyai	1.176	535	1.711
Intan Jaya	919	353	1.272
Deiyai	891	421	1.312
Kota Jayapura	2.244	3.241	5.485
Jumlah 2016	53.887	36.497	90.384
2015	51.779	33.678	85.457

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017



**Tabel: 2.2 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Tahun 2015**

Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	1.650	136	1.786
SLTP	7.606	2.678	10.284
SMA	15.761	8.898	24.659
DI/DII	4.276	4.478	8.754
DIII	3.308	4.018	7.326
S1/S2/S3/Phd	19.178	13.470	32.648
Jumlah 2015	51.779	33.678	85.457

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017

<http://papua.bps.go.id>



**Tabel: 2.3 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, Tahun 2016**

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Partai Demokrat	15	1	16
Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P)	4	3	7
Partai Golongan Karya (Golkar)	6	0	6
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	1	6
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2	1	3
Partai Keadilan Sosial (PKS)	2	1	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPII)	2	0	2
Partai Amanat Nasional (PAN)	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
Papua	48	7	55

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017



**Tabel: 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2016 (ribu orang)**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	167,7	163,9	331,6
5-9	163,9	157,9	321,8
10-14	165,9	150,2	316,1
15-19	166,9	145,8	312,7
20-24	163,3	146,0	309,3
25-29	153,5	143,6	297,1
30-34	143,3	135,3	278,6
35-39	138,0	130,2	268,2
40-44	130,4	118,9	249,3
45-49	109,5	89,6	199,1
50-54	81,0	59,6	140,6
55-59	50,6	35,7	86,3
60-64	27,8	19,3	47,1
65+	28,1	21,5	49,6
Jumlah 2016	1.689,9	1.517,5	3.207,4
2015	1.659,2	1.490,1	3.149,3
2014	1.631,3	1.459,7	3.091,0

Sumber : Proyeksi Penduduk Papua 2010-2035



**Tabel: 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Merauke	113.392	106.614	220.006	106,36
Jayawijaya	108.627	101.602	210.229	106,91
Jayapura	65.185	58.595	123.780	111,25
Nabire	75.878	66.917	142.795	113,39
Kepulauan Yapen	47.689	45.425	93.114	104,98
Biak Numfor	73.228	68.573	141.801	106,79
Paniai	86.892	80.433	167.325	108,03
Puncak Jaya	65.683	54.096	119.779	121,42
Mimika	115.309	90.282	205.591	127,72
Boven Digoel	34.795	29.879	64.674	116,45
Mappi	47.298	46.294	95.592	102,17
Asmat	45.585	44.731	90.316	101,91
Yahukimo	94.932	89.285	184.217	106,32
Pegunungan Bintang	37.720	34.791	72.511	108,42
Tolikara	72.613	61.173	133.786	118,70
Sarmi	19.993	17.518	37.511	114,13
Keerom	28.991	25.139	54.130	115,32
Waropen	14.687	14.116	28.803	104,05
Supiori	9.189	9.297	18.486	98,84
Mamberamo Raya	10.990	10.831	21.821	101,47
Nduga	53.674	42.211	95.885	127,16
Lanny Jaya	94.228	80.554	174.782	116,97
Mamberamo Tengah	25.044	21.652	46.696	115,67
Yalimo	31.993	27.785	59.778	115,14
Puncak	55.026	50.495	105.521	108,97
Dogiyai	46.716	47.093	93.809	99,20
Intan Jaya	23.694	23.606	47.300	100,37
Deiyai	36.824	33.796	70.620	108,96
Kota Jayapura	154.096	134.690	288.786	114,410
Jumlah 2016	1.689.971	1.517.473	3.207.444	111,37
2015	1.659.222	1.490.153	3.149.375	111,35
2014	1.603.158	1.429.330	3.032.488	102,83

Sumber : Papua Dalam Angka, 2017



**Tabel: 4.1 Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2014-2016**

Jenis Kegiatan Utama	2014	2015	2016
I. Angkatan Kerja	1.675.113	1.741.945	1.722.162
1. Bekerja	1.617.437	1.672.480	1.664.485
2. Penganggur	57.676	69.465	57.677
II. Bukan Angkatan Kerja	454.291	447.285	523.300
1. Sekolah	192.348	174.949	196.635
2. Mengurus Rumah Tangga	204.659	230.290	268.585
3. Lainnya	57.284	42.046	59.080
Jumlah	2.129.404	2.189.230	2.245.462
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	78.01	78.67	76.70
Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	3.23	3.44	3.35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 4.2 Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2016**

Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	1.027.345	694.897	1.722.162
1. Bekerja	989.932	674.553	1.664.485
2. Penganggur	37.413	20.264	57.677
II. Bukan Angkatan Kerja	169.309	353.991	523.300
1. Sekolah	101.886	93.749	195.635
2. Mengurus Rumah Tangga	22.323	246.262	268.585
3. Lainnya	45.100	13.980	59.080
Jumlah	1.196.654	1.048.808	2.245.462
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	85,85	66,25	76,70
Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	3,64	2,92	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

<http://papua.bps.go.id>



**Tabel: 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2016**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak/Belum Tamat SD dan SD	951.947	10.476	962.423	203.565
SD	217.026	6.757	223.783	154.622
SLTP	278.847	16.894	295.741	110.727
SMA	73.474	14.421	87.895	33.973
DI/DII/DIII/Akademi/Universitas	143.191	9.129	152.320	20.413
Jumlah	1.664.485	57.677	1.722.162	523.300

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

<http://papua.bps.go.id>



**Tabel: 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2016**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	61.728	44.787	106.515
20-24	121.506	89.869	211.375
25-29	135.814	105.869	241.683
30-34	138.890	102.480	241.370
35-39	134.148	99.971	234.119
40-44	129.608	86.512	216.120
45-49	108.047	68.806	176.853
50-54	79.211	38.215	117.426
55-59	44.338	24.465	68.803
60+	36.642	13.579	50.221
Jumlah	989.932	674.553	1.664.485

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

<http://papua.bps.go.id>





**Tabel: 8.1 Indikator Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah Maret 2014 - Maret 2016**

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
<b>Garis Kemiskinan (Rp)</b>			
Maret 2014	404.944	338.206	355.380
Maret 2015	440.697	388.095	402.031
Maret 2016	466.985	412.991	427.176
<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)</b>			
Maret 2014	35,37	889,04	924,41
Maret 2015	37,27	821,88	859,15
Maret 2016	37,08	874,25	911,33
<b>Persentase Penduduk Miskin (P0)</b>			
Maret 2014	4,47	38,92	30,05
Maret 2015	4,61	36,66	28,17
Maret 2016	4,42	37,14	28,54
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Maret 2014	0,72	8,96	6,84
Maret 2015	0,78	11,71	8,82
Maret 2016	0,88	12,39	9,37
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>			
Maret 2014	0,17	3,04	2,30
Maret 2015	0,21	5,07	3,78
Maret 2016	0,22	5,60	4,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 12.1 Banyaknya Perusahaan Konstruksi di Papua Menurut Skala Usaha Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	Perorangan	Kecil	Menengah	Besar	Non Kualifikasi	Jumlah
Merauke	-	190	60	4	-	254
Jayawijaya	7	230	48	5	-	290
Jayapura	3	163	38	-	-	204
Nabire	63	103	27	2	-	195
Kepulauan Yapen	1	166	21	-	-	188
Biak Numfor	107	325	29	1	4	466
Paniai	20	24	3	-	-	47
Puncak Jaya	-	6	8	-	-	14
Mimika	4	258	46	1	-	309
Boven Digoel	4	120	3	-	-	127
Mappi	-	11	3	-	-	14
Asmat	-	156	-	-	-	156
Yahukimo	-	5	1	-	-	6
Pegunungan Bintang	-	24	5	-	-	29
Tolikara	5	7	1	-	-	13
Sarmi	-	38	10	-	-	48
Keerom	1	65	9	-	-	75
Waropen	-	42	3	-	-	45
Supiori	-	23	1	-	-	24
Yalimo	3	-	-	-	-	3
Kota Jayapura	126	528	227	7	-	888
Jumlah	344	2484	543	20	4	3395

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 12.2 Banyaknya Perusahaan Konstruksi di Papua Menurut Badan Usaha Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	PT/PT Persero	CV	Firma	Koperasi	Perorangan	Jumlah
Merauke	64	190	-	-	-	254
Jayawijaya	53	230	-	-	7	290
Jayapura	38	162	-	1	3	204
Nabire	29	103	-	-	63	195
Kepulauan Yapen	21	165	1	-	1	188
Biak Numfor	30	327	2	-	107	466
Paniai	3	24	-	-	20	47
Puncak Jaya	8	6	-	-	-	14
Mimika	47	258	-	-	4	309
Boven Digoel	3	120	-	-	4	127
Mappi	3	11	-	-	-	14
Asmat	-	156	-	-	-	156
Yahukimo	1	5	-	-	-	6
Pegunungan Bintang	5	24	-	-	-	29
Tolikara	1	7	-	-	5	13
Sarmi	10	38	-	-	-	48
Keerom	9	65	-	-	1	75
Waropen	3	42	-	-	-	45
Supiori	1	23	-	-	-	24
Yalimo	-	-	-	-	3	3
Kota Jayapura	234	528	-	-	126	888
Jumlah	563	2484	3	1	344	3395

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 13.1 Banyaknya Hotel/Losmen, Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Hotel/ Penginapan	Kamar	Tempat Tidur
Merauke	15	426	607
Jayawijaya	18	350	494
Jayapura	23	725	944
Nabire	14	313	462
Kepulauan Yapen	9	232	345
Biak Numfor	16	407	623
Paniai	3	29	51
Puncak Jaya	1	8	12
Mimika	25	860	1 158
Boven Digoel	9	103	120
Mappi	3	51	56
Asmat	3	42	78
Yahukimo	7	39	55
Pegunungan Bintang	1	11	17
Tolikara	2	17	19
Sarmi	6	55	89
Keerom	-	-	-
Waropen	2	59	100
Supiori	-	-	-
Mamberamo Raya	-	-	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	58	2 160	3.175
Jumlah 2016	215	5.887	8.405
2015	218	5.843	8.392
2014	209	5.564	7.946

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 15.1 Jumlah Bank Menurut Kantor dan Kabupaten/Kota di Papua, 2015**

Kabupaten/Kota	BI	MANDIRI	BRI	BTN	BNI	
Merauke	-	3	10		1	2
Jayawijaya	-	1	4		-	-
Jayapura	-	4	5		-	1
Nabire	-	4	6		1	1
Kepulauan Yapen	-	1	2		1	-
Biak Numfor	-	1	4		1	1
Paniai	-	-	-		-	-
Puncak Jaya	-	-	-		-	-
Mimika	-	6	7		3	1
Boven Digoel	-	-	2		-	-
Mappi	-	-	3		-	-
Asmat	-	-	1		-	-
Yahukimo	-	-	-		-	-
Pegunungan Bintang	-	-	-		-	-
Tolikara	-	-	-		-	-
Sarmi	-	1	2		1	-
Keerom	-	2	2		1	-
Waropen	-	-	2		-	-
Supiori	-	-	1		-	-
Mamberamo Raya	-	-	-		-	-
Nduga	-	-	-		-	-
Lanny Jaya	-	-	-		-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-		-	-
Yalimo	-	-	-		-	-
Puncak	-	-	-		-	-
Dogiyai	-	-	-		-	-
Intan Jaya	-	-	-		-	-
Deiyai	-	-	-		-	-
Kota Jayapura	1	15	14		6	7
Jumlah 2015	1	38	65		15	13
2014	1	32	63		19	11

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura





**Tabel: 15.1 Lanjutan**

Kabupaten/Kota	BPD	BII	BDI	NIAGA	Bank Muamalat Indonesia
Merauke	17	-	1	-	1
Jayawijaya	7	-	-	-	-
Jayapura	7	-	2	-	1
Nabire	9	-	2	-	-
Kepulauan Yapen	5	-	1	-	-
Biak Numfor	7	-	2	-	-
Paniai	1	-	-	-	-
Puncak Jaya	2	-	-	-	-
Mimika	15	-	3	5	2
Boven Digoel	1	-	-	-	-
Mappi	4	-	-	-	-
Asmat	-	-	-	-	-
Yahukimo	2	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	1	-	-	-	-
Tolikara	1	-	-	-	-
Sarmi	3	-	-	-	-
Keerom	4	-	-	-	-
Waropen	2	-	-	-	-
Supiori	3	-	-	-	-
Mamberamo Raya	1	-	-	-	-
Nduga	1	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	1	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-
Puncak	2	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-
Intan Jaya	1	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	13	2	4	1	2
Jumlah 2015	118	2	15	6	6
2014	82	4	16	-	6

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

**Tabel: 15.1 Lanjutan**

Kabupaten/Kota	Bank Syariah Mandiri	BCA	BPR	Bank CIMB Niaga	Jumlah
Merauke	1	-	1	-	36
Jayawijaya	-	-	1	-	13
Jayapura	1	-	4	-	25
Nabire	-	-	1	-	24
Kepulauan Yapen	-	-	1	-	11
Biak Numfor	-	-	2	-	18
Paniai	-	-	-	-	1
Puncak Jaya	-	-	-	-	2
Mimika	2	1	2	-	45
Boven Digoel	-	-	1	-	4
Mappi	-	-	-	-	7
Asmat	-	-	-	-	1
Yahukimo	-	-	-	-	2
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	1
Tolikara	-	-	-	-	1
Sarmi	-	-	-	-	7
Keerom	-	-	1	-	10
Waropen	-	-	-	-	4
Supiori	-	-	-	-	4
Mamberamo Raya	-	-	-	-	1
Nduga	-	-	-	-	1
Lanny Jaya	-	-	-	-	0
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	1
Yalimo	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	2
Dogiyai	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	1
Deiyai	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	2	2	5	-	83
Jumlah 2015	6	3	19	-	305
2014	4	2	12	7	259

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura



**Tabel: 15.2 Jumlah Aktiva Bank Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank di Provinsi Papua Tahun 2014-2016 (Juta Rp)**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
Bank Pemerintah	34.105.921	36.913.929	40.144.537
Bank Swasta Nasional	7.823.779	7.919.155	7.640.865
Bank Asing dan Campuran	0.00	0.00	0.00
Bank Perkreditan Rakyat	0.00	911.257	1.010.329
Jumlah	41.929.700	45.744.341	48.795.731

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

<http://papua.bps.go.id>



**Tabel: 16.1 Laju Inflasi Kota Jayapura dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 (2012=100)**

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi. Minuman. Rokok	Perumahan. Listrik. Air. Gas dan Bahan Bakar	Sandang
Januari	-0.22	0.81	0.93	0.68
Februari	0.08	0.47	0.3	0.57
Maret	1.33	0.56	0.81	-0.34
April	-1.19	0.05	0.07	0.01
Mei	-0.52	0.25	0.49	0.38
Juni	1.83	0.58	0.22	0.24
Juli	-0.92	0.51	0.16	0.76
Agustus	-0.6	0.01	0.01	-0.02
September	1.55	0.05	0.05	-0.05
Oktober	-0.82	0.1	0.05	0.63
November	0.41	0.01	0.07	0.09
Desember	2.26	0.05	0.33	0.15
2016	3.16	3.49	3.55	3.13
2014	2.23	1.09	1.88	0.17
2013	7.12	8.18	9.18	4.07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tabel: 16.1 Lanjutan

Bulan	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
Januari	2.48	0.13	-3.82	-0.42
Februari	0.34	-0.23	-1.07	-0.04
Maret	0.21	0.03	0.48	0.71
April	0.33	0.05	0.83	-0.09
Mei	0.04	0.00	0.08	0.07
Juni	0.17	0.06	0.86	0.8
Juli	0.52	0.23	2.68	0.51
Agustus	0.26	0.59	-2.35	-0.61
September	0.02	0.47	-0.45	0.35
Oktober	0.11	0.12	0.44	-0.05
November	0.04	0.01	-0.09	0.11
Desember	-0.03	-0.01	3.7	1.45
2016	4.55	1.46	1.06	2.79
2014	0.14	0.07	2.39	7.98
2013	3.80	3.73	11.97	8.27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua





**Tabel: 17.1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi Papua Tahun 2016 (Rp)**

<b>Golongan Pengeluaran</b>	<b>Makanan</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>Jumlah</b>
< 100 000	86.732	43.371	130.103
100 000 – 149 999	123.369	54.545	177.913
150 000 – 199 999	171.653	79.410	251.063
200 000 – 299 999	295.432	112.092	407.524
300 000 – 499 999	397.033	212.502	609.536
500 000 – 749 999	543.338	337.240	880.578
750 000 – 999 999	675.385	544.579	1.219.964
1 000 000 +	1.129.422	1.291.948	2.421.370
Rata-rata Perkapita	473.382	356.371	829.753

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

<http://papua.bps.go.id>

**Tabel: 19.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2016 (Milyar Rp)**

Lapangan Usaha		2013	2014	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 595.37	17 385.21	20 349.96
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7 386.24	7 987.70	8 917.39
	a. Tanaman Pangan	3 694.57	3 967.24	4 432.67
	b. Tanaman Hortikultura	1 281.07	1 332.89	1 461.07
	c. Perkebunan	1 189.74	1 369.09	1 500.00
	d. Peternakan	1 098.11	1 191.70	1 388.20
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	122.74	126.78	135.45
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2 049.55	2 360.55	2 770.74
3	Perikanan	6 159.59	7 036.97	8 661.83
B	Pertambangan dan Penggalian	48 255.38	46 139.61	49 585.83
C	Industri Pengolahan	2 589.38	3 006.98	3 302.39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31.82	40.11	52.75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71.80	80.34	86.35
F	Konstruksi	13 173.86	16 786.50	20 091.41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 766.48	11 297.26	13 575.22
H	Transportasi dan Pergudangan	5 808.80	6 747.49	7 918.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	876.16	1 064.00	1 232.87
J	Informasi dan Komunikasi	4 359.67	5 005.24	5 742.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 090.18	2 347.20	2 512.31
L	Real Estate	3 159.76	3 548.47	4 082.50
M.N	Jasa Perusahaan	1 434.93	1 617.83	1 771.71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10 095.52	12 269.23	14 804.53
P	Jasa Pendidikan	2 423.67	2 661.40	2 976.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 849.26	2 118.39	2 445.08
R.S.T.U	Jasa lainnya	1 275.14	1 424.15	1 595.32
	Jumlah	119 772	123 180	152 125.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

**Tabel: 19.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Milyar Rp)**

Lapangan Usaha		2013	2014	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13 661.80	14 453.15	15 425.25
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6 275.83	6 663.60	6 943.49
	a. Tanaman Pangan	3 119.76	3 316.05	3 420.24
	b. Tanaman Hortikultura	1 164.97	1 181.27	1 231.69
	c. Perkebunan	942.03	1 022.16	1 072.02
	d. Peternakan	939.76	1 032.78	1 103.78
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	109.31	111.35	115.75
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1 726.84	1 867.59	1 993.70
3	Perikanan	5 659.13	5 921.96	6 488.06
B	Pertambangan dan Penggalian	51 011.15	49 649.17	53 506.28
C	Industri Pengolahan	2 299.67	2 500.13	2 594.41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38.23	40.62	38.93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65.34	69.42	72.19
F	Konstruksi	11 790.56	12 800.12	14 169.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 031.48	9 690.71	10 490.34
H	Transportasi dan Pergudangan	4 543.95	5 010.28	5 487.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733.11	825.28	887.32
J	Informasi dan Komunikasi	4 269.71	4 553.00	4 789.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 727.31	1 852.79	1 901.45
L	Real Estate	2 718.62	2 938.68	3 110.77
M.N	Jasa Perusahaan	1 300.92	1 426.42	1 482.99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8 744.15	10 140.12	11 258.74
P	Jasa Pendidikan	2 337.13	2 527.72	2 710.79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 668.80	1 824.99	1 977.55
R.S.T.U	Jasa lainnya	1 176.89	1 277.53	1 367.46
	Jumlah	117 118.82	121 580.12	131 270.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 19.3 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2014 – 2016 (Milyar Rp)**

	<b>Penggunaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1	Konsumsi Rumah Tangga	65 488.26	71 892.56	80 062.23
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	2 592.80	2 907.83	3 184.67
3	Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	30 559.25	34 183.58	36 386.47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	41 554.02	46 803.54	51 749.80
5	Perubahan Stok	- 378.21	290.33	426.87
6	Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau	19 619.14	27 976.70	28 666.07
7	Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau	14 019.56	11 366.62	11 810.25
8	Net Ekspor Antar Daerah	- 11 876.29	- 20 561.98	-10 295.52
	<b>Jumlah</b>	<b>133 539.41</b>	<b>152 125.95</b>	<b>178 370.34</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 19.4 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Penggunaan Tahun 2014-2016 (Milyar Rp)**

	Penggunaan	2014	2015	2016
1	Konsumsi Rumah Tangga	50 506.76	53 590.76	56 722.70
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	1 995.57	2 112.65	2 250.72
3	Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	24 067.97	25 305.17	25 744.66
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33 171.67	35 530.18	37 824.23
5	Perubahan Stok	- 183.55	132.63	163.80
6	Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau	17 091.17	23 736.76	25 337.05
7	Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau	11 190.90	8 943.34	9 309.08
8	Net Ekspor Antar Daerah	6 121.42	- 193.94	3 742.27
	Jumlah	121 580.12	131 270.88	142 476.35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua



**Tabel: 19.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016 (Milyar Rp)**

Kabupaten/Kota	2014	2015*	2016**
Merauke	8 898,61	10 329,91	11 669,80
Jayawijaya	4 755,59	5 416,21	6 114,54
Jayapura	8 450,28	9 968,93	11 509,54
Nabire	6 708,98	7 706,07	8 656,23
Kepulauan Yapen	2 667,42	3 007,72	3 353,01
Biak Numfor	3 936,32	4 526,40	5 052,67
Paniai	2 532,72	2 917,38	3 348,49
Puncak Jaya	903,18	1 027,17	1 124,02
Mimika	50 328,02	54 322,66	69 273,32
Boven Digoel	3 186,38	3 546,46	3 925,19
Mappi	1 686,58	1 936,41	2 171,23
Asmat	1 483,58	1 629,99	1 821,83
Yahukimo	1 499,05	1 699,64	1 876,96
Pegunungan Bintang	1 181,29	1 309,24	1 478,03
Tolikara	1 018,30	1 128,37	1 243,85
Sarmi	1 601,48	1 835,57	2 059,64
Keerom	1 880,00	2 120,03	2 334,45
Waropen	1 238,68	1 433,06	1 651,62
Supiori	700,69	763,91	830,38
Mamberamo Raya	871,07	1 044,34	1 203,70
Nduga	702,78	808,01	908,19
Lanny Jaya	1 086,95	1 235,02	1 382,51
Mamberamo Tengah	713,43	805,60	899,36
Yalimo	694,59	807,42	915,29
Puncak	766,33	916,80	1 052,96
Dogiyai	786,79	914,77	1 029,62
Intan Jaya	747,92	892,04	1 021,01
Deiyai	757,72	920,97	1 063,02
Kota Jayapura	20 559,46	23 132,20	26 033,14
Jumlah	132 344,20	148 102,28	175 003,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

**Tabel: 19.6 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016 (Miliar Rp)**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
Merauke	7 169,28	7 662,49	8 249,60
Jayawijaya	3 623,14	3 847,87	4 028,69
Jayapura	6 772,03	7 445,58	8 081,35
Nabire	5 530,23	5 946,20	6 355,16
Kepulauan Yapen	2 258,85	2 400,15	2 530,22
Biak Numfor	3 156,01	3 364,87	3 501,93
Paniai	2 224,75	2 443,27	2 627,60
Puncak Jaya	796,89	855,81	895,16
Mimika	53 731,05	57 214,52	64 562,35
Boven Digoel	2 716,09	2 862,38	3 000,68
Mappi	1 366,02	1 459,66	1 560,69
Asmat	1 166,18	1 222,08	1 297,57
Yahukimo	1 160,30	1 243,13	1 307,81
Pegunungan Bintang	1 069,46	1 134,87	1 228,45
Tolikara	845,08	886,16	927,63
Sarmi	1 333,39	1 428,65	1 525,44
Keerom	1 549,48	1 658,15	1 753,26
Waropen	1 032,39	1 132,16	1 239,54
Supiori	618,33	644,64	673,17
Mamberamo Raya	712,66	784,72	850,67
Nduga	573,09	609,49	644,35
Lanny Jaya	550,80	599,70	640,68
Mamberamo Tengah	881,52	939,70	994,26
Yalimo	576,78	621,27	662,02
Puncak	588,48	648,76	700,34
Dogiyai	650,76	710,32	764,01
Intan Jaya	589,84	649,35	695,90
Deiyai	608,61	686,96	741,30
Kota Jayapura	16 746,77	18 166,64	19 480,62
Jumlah	120 598,29	129 269,53	141 520,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

**Tabel: 19.7 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016 (Persen)**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
Merauke	7,74	6,88	7,66
Jayawijaya	7,07	6,20	4,70
Jayapura	11,27	9,95	8,54
Nabire	7,15	7,52	6,88
Kepulauan Yapen	6,93	6,26	5,42
Biak Numfor	5,29	6,62	4,07
Paniai	8,69	9,82	7,54
Puncak Jaya	4,40	7,39	4,60
Mimika	- 0,55	6,48	12,84
Boven Digoel	6,13	5,39	4,83
Mappi	8,26	6,85	6,92
Asmat	5,47	4,79	6,18
Yahukimo	7,03	7,14	5,20
Pegunungan Bintang	6,36	6,12	8,25
Tolikara	6,72	4,86	4,68
Sarmi	6,76	7,14	6,78
Keerom	8,79	7,01	5,74
Waropen	10,47	9,66	9,48
Supiori	6,46	4,25	4,43
Mamberamo Raya	9,72	10,11	8,41
Nduga	9,48	7,71	6,56
Lanny Jaya	7,45	6,60	5,81
Mamberamo Tengah	8,80	6,35	5,72
Yalimo	9,83	8,88	6,83
Puncak	9,40	10,24	7,95
Dogiyai	9,10	9,15	7,56
Intan Jaya	10,70	10,09	7,17
Deiyai	11,52	12,87	7,91
Kota Jayapura	10,19	8,48	7,23
Jumlah	3,65	7,47	9,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**  
**Statistics of Papua Province**

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112  
Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490  
E-mail: [bps9400@bps.go.id](mailto:bps9400@bps.go.id) Homepage: <http://papua.bps.go.id>

ISSN 2477-460X



9 772477 460007